



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI VIII DPR RI
(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama Republik Indonesia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 30 Agustus 2021
Waktu	: 14.00 – 16.39 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Acara	: Penyesuaian Penggunaan (<i>Refocussing</i>) Kebijakan APBN Tahun 2021
Ketua Rapat	: Wakil Ketua Komisi VIII/F-PAN (H. Yandri Susanto, S.Pt.)
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
Hadir	: 47 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI
Anggota yang Hadir	: PIMPINAN: <ol style="list-style-type: none">1. H. Yandri Susanto, S.Pt (F-PAN)2. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si.(F-P. Golkar)3. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si. (F-PDI Perjuangan)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI PERJUANGAN

4. Ina Ammania
5. Drs. Samsu Niang, M.Pd.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

6. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H.
7. Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M.
8. Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H.
9. Muhammad Ali Ridha.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

10. M. Husni, S.E., M.M.
11. Dr. H. Jeffry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

12. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., MMtr.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

13. H. Maman Imanul Haq.
14. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.
15. MF. Nurhuda Y.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

16. Drs. H. Achmad, M.Si.
17. H. Hasani Bin Zuber, S.IP.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

18. K.H. Bukhori, Lc., M.A.
19. H. Iskan Qolba Lubis, M.A.
20. Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

21. H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

22. K.H. Muslich Zainal Abidin

Anggota Izin : 1. H. John Kenedy Azis, S.H. (F- PG)
2. H. Mhd. Asli Chaidir, S.H. (F-PAN)

Undangan : Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajaran

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):

*Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*
Selamat siang, Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Pak Wamen.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, baik yang hadir secara fisik di ruang Komisi VIII, maupun secara virtual.

Hadirin yang berbahagia.

Mengawali Rapat Kerja pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan pada hari ini kita bisa melaksanakan Rapat Kerja pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelum rapat dimulai sebagaimana biasa di Komisi VIII kita akan berdo'a sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, semoga Rapat Kerja ini bisa berjalan baik dan lancar. Bagi yang beragama Islam kita baca umul kitab surat Al Fatihah.

BERDOA : MULAI BERDOA : SELESAI

Pak Menteri yang saya hormati,
Para Pimpinan dan Anggota Komisi VIII.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa sesuai dengan Acara Rapat-rapat di DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021 – 2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 13 Juli 2021, dan sesuai dengan Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 18 Agustus 2021, maka pada hari ini Senin, 30 Agustus 2021 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia, membahas penyesuaian penggunaan anggaran (*refocusing*) Kementerian Agama tahun 2021 beserta isu-isu aktual yang sejatinya minggu kemarin, tapi karena Pak Menteri lagi ada halangan kita do'akan Pak Menteri sehat terus dan tidak ada hal-hal yang mengawatirkan buat kita semua.

Hadirin yang berbahagia,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI pada rapat hari ini sudah hadir secara fisik ada 13 anggota, secara virtual 32 anggota. Dan dari 9 fraksi. Oleh karena itu berdasarkan Tata Tertib Pasal 254 ayat (5) dan

sesuai dengan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, bahwa kehadiran anggota secara fisik dibatasi karena tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu kuorum telah tercapai, maka izinkan kami membuka Rapat Kerja ini dengan mengucapkan “*Bismillahirrahmanirrahim*” rapat ini saya buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA: PUKUL 14.09 WIB.)

Baik, agenda kita pada hari ini, yang pertama pengantar dari Pimpinan rapat; yang kedua, penjelasan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai *refocusing* anggaran tahun 2021 beserta isu-isu aktual; yang ketiga, respon atau tanya jawab dari para Anggota termasuk dari meja Pimpinan; yang keempat, kita akan membuat sebuah kesimpulan dari rapat kerja ini; dan yang kelima penutup. Apakah agenda yang saya bacakan bisa disetujui? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, kita mulai rapat pukul 14.15 WIB, kita akhiri pukul 16.00 WIB. tapi bila mana situasi perlu diperpanjang bisa kita perpanjang. Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, Pak Menteri yang saya hormati, para Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang MD3 Pasal 98 ayat (2) huruf c, disebutkan bahwa tugas Komisi dibidang anggaran adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan tugas program kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi.

Pemerintah pada tahun 2021 telah melakukan penyesuaian anggaran, ini Bapak/Ibu implementasi dari Perpu Nomor 1 dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020, bahwa pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan politik anggaran ditengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu di Kementerian Agama sebagaimana kita ketahui sudah empat kali terjadi *refocusing*.

Yang pertama, *refocusing* tahap pertama sebesar Rp483.054.000.000,- untuk pelaksanaan program Covid-19.

Yang kedua, *refocusing* tahap dua tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor sekian tanggal 18 Mei 2021 yang menyebabkan anggaran Kementerian Agama mengalami penyesuaian sebesar Rp712.078.000.000,- untuk pemulihan ekonomi nasional,.

Yang ketiga, *refocusing* tahap tiga tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor sekian tertanggal 6 Juli 2021 yang menyebabkan anggaran Kementerian Agama mengalami penyesuaian sebesar Rp385.046.000.000,- untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19.

Keempat, *refocusing* tahap empat tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2021 yang kembali menyebabkan *refocusing* dan realokasi anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar Rp399.091.000.000,- untuk menyukseskan pelaksanaan PPKM.

Berdasarkan hal tersebut Kementerian Agama pada tahun 2021 yang semula mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp66.961.386.828.000,- telah mengalami beberapa kali penyesuaian dengan total penghematan dari empat tahap *refocusing* sebesar Rp1.981.702.319.000,-. Oleh karena itu Komisi VIII DPR RI pada rapat kerja kali ini ingin mendapatkan penjelasan dari Menteri Agama Republik Indonesia mengenai pengaruh dari adanya *refocusing* anggaran tersebut terhadap pencapaian program yang telah direncanakan. Karena hampir Rp2.000.000.000.000,- ini Pak Menteri lumayan besar.

Selain *refocusing* anggaran tersebut, Komisi VIII DPR RI pada hari ini juga ingin mendapatkan penjelasan langsung dari Menteri Agama mengenai beberapa hal isu aktual diantaranya, wacana pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Di madrasah-madrasah, dan di perguruan tinggi sebagaimana kunjungan kami kemarin Pak Menteri di UIN Banten, mereka sedang besiap dan yang sudah melaksanakan vaksin bagi 4.000 mahasiswa. Hal ini penting untuk dibahas agar kita memastikan pemberlakuan pembelajaran dan perkuliahan tatap muka ini telah di rancang dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk bagaimana pengawasan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Jika kebijakan tersebut diterapkan serta pencegahan terhadap mitigasi, jika terdapat peserta didik yang terpapar aspek anggaran dalam pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan berbagai kebijakan lainnya agar tidak terjadi klaster-klaster baru penyebaran virus Covid-19 akibat dikeluarkannya kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, hal yang lain yang menarik untuk dibahas pada kesempatan ini adalah mengenai harus terlibatnya Kementerian Agama untuk secara pro aktif menyukseskan program percepatan vaksin nasional. Sebagaimana kita ketahui Pak Menteri secara nasional baru 10%, yang tertinggi memang diatas 70% baru DKI dan Bali Pak. Oleh karena itu Kementerian Agama bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, TNI,

Polri dan pihak-pihak terkait termasuk BNPB untuk melaksanakan vaksinasi di kampus-kampus perguruan tinggi keagamaan Islam, atau kampus-kampus dibawah Kementerian Agama, termasuk di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren atau sekolah keagamaan dibawah Kementerian Agama. Sehingga vaksin bisa terlaksana dengan baik dan bisa membantu program nasional. Kalau bisa MoU bagus ini Pak Menteri, karena persiapan tatap muka salah satu syaratnya adalah vaksin.

Permasalahan kapan dibukanya pelaksanaan ibadah umroh juga menjadi isu penting hari ini Pak Menteri, karena sebagaimana kita ketahui tanggal 10 Agustus kemarin Kerajaan Saudi Arabia sudah memperbolehkan umroh kembali bagi negara-negara diluar Arab Saudi. Tapi faktanya hari ini Indonesia masih termasuk 9 negara yang belum boleh masuk secara langsung, masih perlu isolasi atau transit di negara lain selama 14 hari. Tentu ini akan sangat berpengaruh dengan biaya, kemudian pengurusan umroh bagi jamaah umroh dari Indonesia. Karena animo sekarang sangat tinggi karena dibataalkannya atau dua kali haji berturut-turut, maka animo umroh ini sangat tinggi, oleh karena itu mungkin perlu kita membahas ini secara serius, sehingga jamaah umroh Indonesia tidak perlu lagi transit di negara antara tapi bisa langsung ke tanah suci. Tentu dengan catatan lobi dan penanganan Covid di dalam negeri termasuk vaksin tadi bisa kita sukseskan.

Isu aktual yang lainnya yang masih menjadi pertanyaan banyak hari ini dikalangan pondok pesantren Pak Menteri. Yaitu tentang bantuan operasional pondok pesantren yang kembali pada tahun ini banyak pertanyaan tadi, apakah seperti tahun yang lalu, karena hampir 22.000 pondok pesantren dapat bantuan. Tahun ini mungkin berkurang tajam karena terbatasnya anggaran, tapi kami yakin Kementerian Agama terus berjuang sehingga kehadiran pemerintah untuk pondok pesantren dan madrasah swasta, termasuk TPQ selalu ada dan terasa manfaatnya dikalangan pondok pesantren, madrasah dan TPQ.

Oleh karena itu ini juga penting menjadi isu kami Pak Menteri beberapa kali ditingkat Pimpinan dan Anggota, jumplangnya anggaran atau perbedaan yang sangat tajam, anggaran Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, ini menjadi PR kita semua sehingga ada semacam kesetaraan anggaran, karena yang dikelola sama dunia pendidikan, tetapi anggaran ataupun politik anggaran negara belum berpihak kepada Kementerian Agama.

Oleh karena itu dari meja Pimpinan dan kami yakin seluruh Anggota Komisi VIII DPR RI sepakat untuk mendorong peningkatan anggaran Kementerian Agama sehingga pelayanan terhadap madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah dibawah Kementerian Agama bisa mengikuti perkembangan atau mengejar ketertinggalan dari sekolah-sekolah yang ada dibawah Kementerian Pendidikan Nasional. Oleh karena itu usaha-usaha akan terus kita lakukan sehingga anggaran

Kementerian Agama minimal walaupun tidak sama mendekati Pak Menteri dengan Mendikbud, yang hari ini jumlahnya luar biasa.

Oleh karena itu mari kita dengarkan penjelasan dari Menteri Agama Republik Indonesia terhadap beberapa hal yang kami sampaikan tadi, masalah *refocusing*, kemudian isu-isu aktual. Mudah-mudahan rapat ini berjalan baik dan lancar, dan kepada Pak Menteri kami persilakan.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Oom swastiastu, namo budaya, salam kebajikan.

Yang saya hormati, saya cintai Ketua Komisi VIII sahabat saya Pak Yandri Susanto.

Yang terhormat sahabat saya Pak KH. Ace Hasan Syadzily, sahabat saya Pak Marwan Dasopang.

Yang saya hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VIII DPR RI.

Yang pertama, sebelum menyampaikan terima kasih kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya juga harus menyampaikan terima kasih kepada Bapak/Ibu sekalian karena persetujuan penundaan rapat sebelumnya. Karena ada satu dan lain hal yang memang tidak memungkinkan di minggu yang lalu terima kasih.

Pada kesempatan yang baik ini Bapak/Ibu sekalian perkenankan kami untuk menyampaikan, sekali lagi penghargaan kepada Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi VIII yang terhormat, yang selalu memberikan motivasi, perhatian, dan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran, sehingga Kementerian Agama secara berkesinambungan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, serta kualitas dalam pelayanan bimbingan dan pendidikan kepada umat beragama di Indonesia.

Selanjutnya perkenankan kami untuk menyampaikan *refocusing* dan realokasi belanja pada APBN Kementerian Agama di tahun 2021 serta beberapa isu aktual di bidang pembangunan bidang agama dan pendidikan keagamaan, serta alternatif solusinya.

Yang pertama, APBN Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021, postur anggaran tahun 2021 dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahunan tahun 2021, Kementerian Agama telah menerima Surat Menteri Keuangan Nomor 903/MK.02/2020 tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021. Alokasi anggaran

Kementerian Agama tahun 2021 sebesar Rp66.961.386.822.000,- dengan uraian alokasi anggaran pada masing-masing eselon I sebagaimana berikut.

Dalam pelaksanaannya anggaran ini selanjutnya mengalami perubahan sesuai dinamika kebijakan APBN, perubahan terjadi karena adanya penyesuaian anggaran belanja, penambahan, maupun berupa penghematan anggaran Kementerian Agama sepanjang tahun 2021. Perubahan berupa penyesuaian terjadi akibat adanya perubahan target anggaran yang bersumber dari BLU pada perguruan tinggi keagamaan negeri, luncuran surat berharga syari'ah negara tahun 2020, dan penerimaan hibah langsung dalam negeri. Sedangkan perubahan berupa penambahan anggaran diakibatkan adanya tambahan anggaran untuk pemberian kuota internet untuk PJJ dan pemenuhan anggaran untuk pembayaran hutang selisih tunjangan kinerja (Tunkin) guru madrasah dan Dosen pada PTKN tahun 2015 sampai 2018.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat, karena dukungannya pembayaran Tunkin guru madrasah dan dosen pada PTKN yang terhutang sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 telah mulai kami selesaikan sesuai hasil verifikasi dari BPKP. Terkait pembayaran selisih Tunkin guru madrasah lebih lanjut diurai pada bagian isu aktual dan relatif solusinya dalam laporan ini.

Selanjutnya perubahan berupa penghematan anggaran belanja terjadi dikarenakan karena adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja kementerian/lembaga tahun anggaran 2021 yang diterapkan oleh pemerintah, dimaksudkan untuk menjaga defisit APBN tahun anggaran 2021 sesuai dengan proyeksi agar tercipta APBN yang *prudence* dan *sustainable*. Besaran anggaran Kementerian Agama berdasarkan Pagu harian, per 20 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. Alokasi di tahun 2021 sebesar Rp66.961.386.822.000,- mengalami penyesuaian sebesar Rp533.126.576.000,- dan penambahan Rp2.476.416.990.000,- dan mengalami *refocusing* sebesar Rp1.981.702.319.000,- sehingga Pagu akhirnya adalah Rp67.995.228.069.000,-.

Refocusing belanja Kementerian Agama, *refocusing* belanja kementerian/lembaga tahun 2021 ditujukan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan antara lain untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional. Dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat, percepatan program pemulihan ekonomi nasional, dan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat.

Refocusing dan realokasi belanja Kementerian Agama tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 4 tahap, yang didasarkan pada Surat Menteri Keuangan dengan total penghematan sebesar Rp1.981.702.319.000,-. Dengan rincian berdasarkan tahapan Surat Menteri Keuangan sebagaimana tabel berikut ini. Surat Menkeu bernomor 30-MK/2021 tertanggal 12 Januari

2021 nilainya Rp483.541.964.000,-. Ini kriterianya Rupiah Murni non operasional diluar PN dan fungsi agama. Kemudian yang kedua surat Menkeu nomor 408-MK/02/2021 tertanggal 18 Mei 2021 nilai *refocusing*-nya Rp712.784.593.000,- kriterianya RM dan BLU, operasional berupa belanja pegawai dan semua fungsi.

Kemudian yang ketiga, Surat Menkeu bernomor S-584/MK.02/2021 tertanggal 6 Juli 2021 nilainya sebesar Rp385.463.153.000,- kriterianya RM non operasional diluar PN dan semua fungsi. Kemudian yang keempat, Surat Menkeu Nomor S-629/MK.02/2021 tertanggal 20 Juli 2021 nilai *refocusing*nya Rp399.912.609.000,- dengan kriteria RM operasional dan non operasional untuk semua fungsi sehingga totalnya berjumlah Rp1.981.702.319.000,-.

Dalam pelaksanaan kebijakan *refocusing* tetap berupaya mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan layanan perkantoran lainnya. Upaya mempertahankan kualitas pelayanan ini dilakukan terutama pada kegiatan-kegiatan yang dapat memaksimalkan penggunaan IT, dalam bentuk pola kegiatannya, seperti pertemuan secara virtual, daring atau on line, penelitian dan survey *on line*, pengembangan layanan berbasis aplikasi dan diklat *blended learning* dan/atau *on line learning*.

Kemudian realokasi anggaran tahun 2021, sebagai imbas dari pelaksanaan kebijakan *refocusing* belanja Kementerian Agama tahun 2021 sebagaimana tersebut diatas, serta kebijakan pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi yang lalu. Upaya pemenuhan prioritas Kementerian Agama tahun 2021, dan pelaksanaan beberapa kegiatan yang dipandang urgen untuk dilaksanakan pada tahun 2021, sebagaimana masukan Komisi VIII DPR RI yang terhormat, Kementerian Agama berupaya melakukan realokasi intern anggaran tahun 2021 yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan *refocusing* anggaran. Realokasi tersebut dilaksanakan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2021, namun belum teranggarkan pada DIPA Tahun Anggaran 2021.

Kegiatan prioritas tersebut antara lain; yang pertama, adalah kegiatan jagong masalah umroh dan haji (Jamaroh). Yang kedua, desiminasi terkait pembatasan keberangkatan jamaah haji tahun 2021; yang ketiga, perbaikan atau renovasi tata ruang pelayanan haji; yang keempat, sarana prasarana pada perguruan tinggi keagamaan dan instansi vertikal Kementerian Agama; yang kelima, dukungan operasional perkantoran haji, yaitu yang pertama penguatan moderasi beragama, kedua transformasi digital, ketiga revitalisasi KUA, yang keempat Universitas Islam Siber (*Cyber Islamic University*), yang kelima kemandirian pesantren, keenam penerapan indeks keberagamaan (*religious index*) dan yang ketujuh kegiatan persiapan tahun toleransi 2022.

Pimpinan dan para Anggota yang terhormat.

Berikutnya adalah isu aktual dan alternatif solusinya, beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai isu aktual dan alternatif solusinya sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama antara lain tadi yang pertama sudah disinggung oleh ketua, terkait dengan pembelajaran tatap muka di madrasah-madrasah dan perguruan tinggi keagamaan. Perlu kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang terhormat, bahwa PTM ini sesuai dengan SKB 4 Menteri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan maka pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1 sampai 3. Maksimal 50% kapasitas untuk setingkat SD, SMP, SMA, SMK maksimal 33% atau 5 orang untuk PAUD, maksimal 62% atau 5 orang untuk SLB dengan prokes ketat masker yang diwajibkan dan sebagainya.

Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa vaksinasi pelajar tidak menjadi syarat melakukan PTM terbatas. Walaupun ini tetap dilakukan, artinya usaha untuk apa melakukan vaksinasi terhadap pelajar yang sudah memenuhi syarat terus dilakukan. Kemudian vaksinasi guru dan tenaga pendidik ini juga tidak menjadi syarat untuk melakukan PTM terbatas, meskipun secara faktual sudah hampir 50% tenaga pendidik di lingkungan Kementerian Agama ini sudah tervaksinasi dengan lengkap.

Kemudian satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4 tetap melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh, tidak boleh dengan PTM terbatas. Pelaksanaan PTM terbatas dilaksanakan tetap sesuai dengan SKB 4 menteri, kami bersepakat di SKB ini Pimpinan dan Anggota yang terhormat, ini poin-poin yang bisa dilakukan untuk melaksanakan PTM terbatas, namun di Kementerian Agama kami menambahkan satu poin pelaksanaan PTM terbatas ini harus melalui izin dari gugus tugas setempat. Kepala daerah, kepala daerah dan gugus tugas covid setempat, jadi yang ini mungkin tidak tercantum di SKB 4 menteri tersebut tapi ini kita tambahkan sendiri.

Berikutnya kami perlu sampaikan juga penyelenggaraan ibadah umroh untuk tahun 1443 hijriah atau 2021 masehi nanti oh yang sudah ya. Berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah umroh tahun 1443 hijriah atau 2021 masehi ini perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi Nomor 421214038 tanggal 15 Zulhijah 1442 Hijriah atau 25 Juli 2021 Masehi yang berisi antara lain ibadah umroh tahun 1443 Hijriah dimulai pada tanggal 1 Muharam 1443 Hijriah atau 10 Agustus 2021 Masehi.

Kemudian Pemerintah Republik Indonesia belum menerima pemberitahuan secara resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah umroh tahun 1443 Hijriah ini. Lalu suspen sudah dicabut, namun masih terbatas pada WNI yang memiliki izin tinggal atau iqoma Arab Saudi dengan syarat telah vaksin dosis lengkap dengan vaksin yang diakui oleh Arab Saudi.

Berikutnya vaksin sinovac dan sinofam sudah diakui oleh pemerintah Arab Saudi, namun saat berangkat jamaah umroh nanti wajib diberikan vaksin booster dari infasmi vaksin yaitu Moderna, Pfizer, Johnson and Johnson dan Astra Zeneca. Untuk memperjelas ini Pimpinan dan Anggota yang terhormat, kami dalam waktu yang paling memungkinkan akan segera ke Arab Saudi untuk memperjelas hal ini, mudah-mudahan ada kabar baik setelah dari sana.

Kemudian isu yang terkait dengan progres seleksi JPT Madya dan Pratama Kementerian Agama. Seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya akan diajukan Menteri Agama selaku pejabat pembinaan kepegawaian kepada Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan penetapan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara untuk seleksi JPT Pratama atau setingkat Eselon II Pansel telah mengumumkan hasil akhir seleksi administrasi calon JPT Pratama Kementerian Agama, total ada 176 nama calon pejabat setingkat eselon II yang tersebar pada 20 formasi yang diumumkan lulus seleksi administrasi.

Kemudian terkait isu progres penerimaan ASN, CPNS dan CP3K, tahun ini Kementerian Agama membuka 10.819 formasi CASN, rekapitulasi panitia seleksi diperoleh 111.660 pelamar CASN Kemenag tahun 2021. Perbandingan formasi terhadap pendaftar kurang lebih 1 banding 100. Formasi CP3K yang berjumlah 9.458 merupakan lanjutan dari seleksi CP3K tahun 2019, formasi ini dikhususkan bagi eks tenaga honorer kategori 2 yang sudah terdaftar dalam data best BKN dan telah mengikuti pendaftaran dan lulus seleksi administrasi pada tahun 2019. Sedangkan untuk 1.361 formasi CPNS, formasinya terbagi dalam formasi umum dan formasi khusus.

Terkait dengan kebijakan pelaksanaan kegiatan peribadatan dan keagamaan di tempat ibadah pada masa PPKM pemerintah mengeluarkan surat edaran yang mengatur tiga pokok yaitu tempat ibadah, pengelolaan tempat ibadah dan jamaah, seluruh elemen Kemenag kita dorong untuk secara intensif melakukan sosialisasi edaran ini kepada masyarakat melalui berbagai cara dan saluran. Kami perlu mempertegas bahwa tidak ada dalam masa pandemi ini dan PPKM ini, tempat ibadah ditutup, yang ada adalah pembatasan pelaksanaan ibadah. Jadi jika ada isu tempat ibadah ditutup itu tidak benar.

Kemudian pelaksanaan optimalisasi asrama haji dalam penanganan pasien Covid-19, pemerintah sudah mengalih fungsikan UPT Asrama Haji menjadi Rumah Sakit Covid-19. Alih fungsi sementara asrama haji ke rumah sakit ini merupakan wujud komitmen Kementerian Agama, untuk turut serta dalam penanggulangan Covid-19 yang masih mewabah di Indonesia. Sementara masih ada 2 baru ada 2 asrama haji yang dialih fungsikan menjadi RumahSakit Covid-19 yaitu Rumah Sakit Haji Pondok Gede, dan Rumah Sakit Haji Lampung.

Lalu sertifikasi halal gratis, terkait dengan isu ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui BPJPH, pada tahun 2021 akan

mencanangkan program sertifikasi awal gratis bagi UMKM jadi seluruh UMKM sampai ke mikro didorong untuk melakukan sertifikasi halal dan ini diberikan secara gratis. Kemudian penyaluran tunjangan kinerja terhutang guru madrasah tahun 2015 sampai tahun 2018. Sebagaimana yang kami sampaikan usulan anggaran tunggakan selisih tunjangan guru madrasah tahun 2015 – 2018 sudah disetujui Menteri Keuangan. Tunggakan selisih tunjangan kinerja guru madrasah diharapkan bisa direalisasikan seluruhnya secepatnya.

Terkait dengan isu pemberian keringanan UKT di PTKN Pimpinan dan Anggota yang terhormat, keputusan Menteri Agama Nomor 515 tahun 2020 yang kemudian dirubah atau diperbaharui dengan KMA Nomor 81 tahun 2021, tentang keringanan uang kuliah tunggal pada masa pandemi Covid-19 diimplementasikan di PTKN seluruh Indonesia, sebagai keputusan yang mengikat dan menjadi komitmen bersama.

Formasi SDM penghulu, isu terkait penghulu seluruh Indonesia yang berjumlah 8.978 orang ini jumlah ini masih setengah dari kondisi ideal, untuk melayani pernikahan 2 juta peristiwa pernikahan setiap tahunnya yang tersebar di 5.897 KUA diseluruh Indonesia. Setidaknya dibutuhkan formasi calon penghulu setiap tahunnya, namun formasi yang diperoleh hanya 150 orang setiap tahun.

Terkait dengan isu seleksi imam masjid untuk Uni Emirat Arab perlu kami laporkan bahwa pengiriman imam masjid ke Uni Emirat Arab merupakan bagian strategis dari kerja sama bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dengan Uni Emirat Arab sekaligus akan menjadi duta Indonesia di Uni Emirat Arab. Ini terus kita kebut dan target tahun ini bisa tercapai 100 imam untuk masjid-masjid di Uni Emirat Arab dari Indonesia.

Memang agak lambat karena Uni Emirat Arab ini mempersyaratkan tiga syarat utama yang menurut kami sangat berat Ketua dan para Anggota yang saya hormati. Yaitu harus hafal Qur an, kemudian bisa berbahasa Arab dan Qori, nah mencari perpaduan tiga hal ini sangat sulit. Tapi kita akan terus berusaha sampai perhari ini masih terjaring 30 sekitar 33, 33 imam, dari 200 target yang diminta, tahun ini mereka akan minta 100 kemudian tahun depan 100 imam kita sedang kejar supaya sebelum kunjungan Presiden Jokowi ke Uni Emirat Arab yang direncanakan November target 100 ini bisa dipenuhi. Oleh karena itu tentu dorongan dan bantuan dari bapak, ibu sekalian siapa tahu ada diantara saudara, tetangga atau siapa kita ini yang memenuhi tiga kriteria utama itu bisa kita dorong menjadi imam masjid di Uni Emirat Arab.

Kemudian yang terkait dengan sertifikasi tanah wakaf, sinergitas dengan Kementerian Agraria, program ini merupakan program sinergi lintas sektor kerja sama antara Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional melalui program PTSL, untuk merealisasikan percepatan tanah wakaf dengan target minimal 5.000 lokasi setiap tahunnya.

Dan isu yang terakhir terkait dengan pencaanangan Candi Prambanan sebagai tempat ibadah Hindu Nusantara dan dunia. Pencaanangan Candi Prambanan sebagai tempat ibadah Hindu Nusantara dan dunia sekarang masih dalam tahap penyusunan MoU tingkat kementerian yang terkait yang mengelola Candi Prambanan. Dan akan dilanjutkan dengan rancangan yang lebih lanjut.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang terhormat.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja membicarakan penyesuaian penggunaan, *refocusing* APBN 2021 dan isu-isu aktual serta alternatif solusinya. Besar harapan kami atas dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat, dalam perencanaan dan penganggaran yang telah kami sampaikan diatas dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang akuntabel dan transparan.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat, atas perhatian dan kerjasama dalam peningkatan kinerja Kementerian Agama. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa* meridhoi ikhtiar kita semua. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Menteri atas paparannya, yang menarik tadi imam di Uni Emirat Arab itu menarik juga itu Pak Menteri. Jadi kalau para anggota di Dapilnya masing-masing bisa cari yang hafal 30 juz, bisa bahasa Arab, dan Qori ini kumulatif tidak bisa salah satu kan? Iya, jadi kalau hafal nadanya tidak bagus, imam juga tidak enak ya artinya tidak dapet harus qori ya. Hafal 30 juz tidak bisa bahasa Arab tidak bisa juga plonga-plongok nanti disana. Jadi mungkin ini peluang juga bagi kita untuk membantu Kementerian Agama menyebarkan informasi ini.

Kemudian Pak Menteri mungkin yang lagi heboh di tengah masyarakat sekarang itu nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Dirjen Bimas Islam, bantuan untuk masjid dan mushola itu Pak. Kita juga belum tahu itu informasinya, banyak yang tanya masalahnya itu.

Baik, Bapak/Ibu Anggota dan Para Pimpinan, tadi sudah kita mendengarkan penjelasan dari menteri tentang agenda *refocusing* dan isu-isu aktual sudah dipaparkan, sekarang kita beri kesempatan kepada para anggota mulai dari PDIP Ibu Ina, kami persilakan Bu Ina, setelah itu siap-siap dari Golkar.

F-PDIP (INA AMMANIA):

Terima kasih Pimpinan.

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan Komisi VIII.
Pak Menteri beserta jajarannya yang terhormat.

Dari paparan yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama secara garis besar kami bisa memahami adanya *refocusing* yang dilakukan oleh pemerintah, mengingat situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga kini, dan tentu hal tersebut berdampak pada semua bidang. Sehingga anggaran yang sudah ditetapkan perlu dilakukan realokasi dan penghematan. Namun demikian kami mengapresiasi realokasi tersebut dilaksanakan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2021.

Tadi saya menyimak yang disebutkan oleh Pak Menteri supaya saya garis bawah tidak menguap pak. Biasanya kalau sudah disebutkan, setelah kita pulang rapat itu menguap sampai satu bulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan sampai kita tanya yang kemarin disebutkan Pak Menteri itu jadi tidak ya? Jadi tidak ya? Oleh sebab itu saya sekarang garis bawah supaya tidak menguap. Kegiatan Jagong masalah umroh dan haji jamarah dan disitu saya minta garis bawah Pak, di *note* tidak memakai uang transportnya itu apa namanya KTP atau buku tabungan, itu menyulitkan. Kadang-kadang di daerah itu juga tidak punya buku tabungan Pak, yang ada juga bank yang ada di RT, RW yang hanya ditulis tangan.

KETUA RAPAT:

Maksudnya pas acara langsung dibagi *transport*-nya ya?

F-PDIP (INA AMMANIA):

Iya itu Pak lebih.

KETUA RAPAT:

Saya hanya memperjelas maunya Bu Ina saja ini.

F-PDIP (INA AMMANIA):

Desiminasi terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2021 itu sangat penting Pak, kami di daerah diudak-udak Pak. Kalau Bapak mungkin di Jakarta tidak seperti kami yang selalu berhadapan dengan konsumen. Tapi seperti Pak Menteri juga pernah merasakan betapa getirnya kita ini di daerah Pak.

Perbaikan renovasi tata ruang pelayanan haji. Nah ini saya tanya untuk kabupatenkah, atau hanya untuk di kota besar seperti Jakarta yang kantornya Pak Menteri saja? Tapi kita semua hanya mendengar, mendengar tata ruang pelaksanaan haji ketika kita mengucapkan itu, dan di daerah Bu kantor kami seperti ini, bukannya pada waktu RDP Ibu mengatakan akan ada renovasi? Nah itu perlu nanti bapak dan kita semua yang hadir di sini mengawal, jadi jangan sampai menguap.

Sarana prasarana lainnya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pada perguruan tinggi keagamaan dan instansi vertikal Kementerian Agama ini, mohon juga secara eksplisit berkomunikasi kita juga apa, kita juga diberi tahu Pak, sehingga kita tidak tebak-tebak buah manggis. Ini diletakkan di mana ya? Kan ada anggarannya yang mana realokasinya biar jelas gitu lho Pak. Dukungan operasional perkantoran haji tadi kita sudah sebutkan, tetapi nanti penjabarannya juga di terealisasi dengan baik.

Dari pelaksanaan tadi bapak juga menyebutkan bahwa saat ini adalah kita gencar-gencarnya vaksin covid Pak. Di daerah saya kemarin ketika saya kunjungan daerah itu ada dari TNI Pak, vaksin ke pondok pesantren, pondok pesantren malah kita yang Komisi VIII itu tidak tahu. Apakah TNI ini sudah koordinasi atau laporan ke Pak Menteri? Karena kita itu tergagap-gagap ketika di tanya Komisi VIII tahu tidak ini ada semua jadi dari Ngawi, Magetan, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan saya itu tidak tahu pak. Jadi saya datang ditanya juga *plongak-plongok* Pak. Ya karena tidak ada pemberitahuan, mungkin di daerah teman-teman yang lain juga seperti itu maksudnya. Supaya kita nggak kehilangan muka, malu Pak tolong dari jajarannya bapak memberitahu kepada kita, Ibu, Bapak nanti ada apa namanya acara vaksin kegiatan seperti ini, mungkin tidak di semua daerahnya itu. Nah dengan kata-kata seperti itu kan kita siap untuk menjawabnya, kalau kita jawab tidak tahu kan bukan profesional pak artinya.

Selanjutnya saya mau tanya ini Pak, kan disini ada *refocusing* sekolah madrasah yang dapat bantuan dari Bank Dunia saya sebagai Anggota Dewan itu tidak tahu menahu Pak, minta dijabarkan berkaitan dengan adanya program dan kegiatan Kemenag RI dibiayai diluar APBN? Seperti pinjaman Bank Dunia atau yang lain, untuk itu kami mohon informasi seperti apa di tahun 2021 ini? Penting bagi kami sebagai Anggota DPR untuk menjalankan fungsi sebagai pengawasan Pak. Karena di daerah ada pembangunan-pembangunan yang mana kita menanyakan lho bu sudah ada anggarannya bukan dari Kemenag, diluar dari APBN. Sedangkan Pak Menteri, Pak Sekjen

tidak pernah kita berkomunikasi tahunya dilapangan gitu. Itu saja Pak Menteri yang bisa saya pertanyakan.

Wabillahi taufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Ibu Ina Amania dari PDIP, kami persilakan dari Fraksi Partai Golkar Pak HBA.

F-PG (Drs. H. HASAN BASRI AGUS, M.M.):

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua, Rekan-rekan Anggota Komisi VIII yang terhormat, Pak Menteri dan para Eselon I dan Eselon II yang terhormat, Hadirin sekalian yang berbahagia.

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Pak Menteri, beberapa hal yang dapat kami temui pada saat reses maupun kunjungan kerja kemarin. Mungkin lebih panjang dari kunjungan Pak Ketua Komisi kemarin.

Pertama, saya mengomentari masalah *refocusing*, saya pikir saya tidak mengomentari yang penting mungkin ya menyesuaikan saja sesuai dengan kondisi keuangan kita sekarang. Kami yakin Pak Menteri akan menyesuaikan sepanjang tidak menghalangi program-program kita gitu. Mungkin dari sisi anggaran memperketat ikat pinggang kita gitu, jadi mungkin nanti turun ke lapangan ke daerah mungkin agak berkurang pasukan kita gitu.

Kemudian yang kedua, hasil reses kami pertama saya sebagai Dapil Jambi, terima kasih atas program SPSN terhadap UIN Jambi dengan dapat dana Rp560.000.000.000,- dan sekarang proses dalam pembangunan kami yakin betul nanti perguruan tinggi di Jambi yang paling hebat itu nanti UIN Jambi Pak. Sebab gedungnya luar biasa, dalamnya juga hebat, bagus sekali gitu, semangat Pak Rektornya juga luar biasa, saya kunjungan kerja kesana.

Cuma ada persoalan lain proyek yang mangkrak pada tahun 2018 yaitu sportarium dan persoalan hukum dua yang ditahan sudah masuk, sudah inkrah. Dan kejaksan tinggi akan menyelesaikan proses surat apa keterangan dari dia bahwa ini sudah bisa diproses lanjutan, persoalannya adalah kami mengharapkan agar tahun 2022 kalau bisa proyek ini bisa jalan

dan bisa selesai pak. Sebab tahun 2023 menjadi pekan kreatif mahasiswa se Sumatera itu akan dilaksanakan di UIN Jambi.

Itu yang selanjutnya yaitu masalah yang lain hasil kunjungan kami, kaitannya dengan hasil kunjungan kemarin ke Banten. Masalah guru besar Pak, kita sangat butuh guru sekarang, guru besar ini dipercepat, dan dosen-dosen kita itu siap di lapangan itu, tapi persoalannya adalah kaitannya dengan Mendiknas itu, dan mohon ini koordinasi ini bagaimana caranya mungkin dipercepat dan koordinasi dengan Menteri dan Pak Ketua kemarin sudah merencanakan akan ada rapat gabungan, diantara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini.

Disisi lain menafsirkan Peraturan Presiden Nomor 37 tentang Transformasi IAIN ke UIN, ini ada perbedaan tafsiran antara kita dengan Diknas Pak, masalah guru atau mata kuliah umum itu. Nah kita dari pendirian dari IAIN kepada UIN adalah memberi kesempatan kepada perguruan tinggi agama untuk membuat perguruan tinggi umum yang dipadukan dengan agama. Kita tidak bisa bayangkan nanti anak andaikata seorang dokter itu hafal Al Qur'an, dia bisa memadukan ilmu agama dengan ilmu kedokteran dan ilmu umumnya. Kemudian demikian juga seorang insinyur pertanian ahli agama, luar biasa, agaknya dalam pikiran kami mereka mungkin khawatir akan terkalahkan mungkin kedepan gitu, andaikan ini dibebaskan.

Oleh sebab itu ada edaran dari Menteri Diknas untuk menambah pelajaran umum itu tidak diperbolehkan gitu, itu ada hitung-hitungan sedikit. Nah kita ini perlu juga nanti ini dibahas dalam rapat gabungan ini. Dan itu yang kita lihat di lapangan sekali lagi potensi UIN, UIN tadi kata Pak Dirjen kemarin itu, itu kedepan andaikata memang ini diberi kesempatan ini luar biasa nantinya dibayangkan sekali lagi saya katakan seorang dokter yang ahli bidang agama.

Kemudian terakhir Pak, masalah PLU Pak, UIN Jambi mau mengangkat guru honor, dari sisi dana BLU dimungkinkan kita punya, tetapi ada edaran dibawah Pak tidak boleh mengangkat guru honor atau dosen honor, tenaga honor untuk kemajuan UIN sendiri dari dana BLU. Dana BLU kita cukup besar dan ini mungkin perlu kajian dan mohon petunjuk bapak, sekali lagi ini hasil kunjungan reses kami kunjungan ke UIN tentang masukan-masukan atau persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan.

Itu mungkin beberapa hal yang kami sampaikan, izin Pak Ketua kami akan menyampaikan surat analisa dari UIN Jambi tentang penambahan mata pelajaran umum tadi dan tiga hal tadi, yang akan saya sampaikan langsung suratnya ini kepada Bapak Menteri, saya maju kedepan izin.

Terima kasih atas perhatiannya, Wallahul muafiq ila aqwamithariq.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Tolong siap difoto jangan tidak difoto, iya iya ini Gubernur Jambi yang menyerahkan ini, Pak HB yang sana pak yang foto Pak. Ini Pak Hasan Basri Agus manta Gubernur Jambi jadi tahu persis tentang Jambi. Cukup Pak HBA ya, oke terima kasih, Pak HBA danPpak Menteri makanya tadi saya minta difoto.

Baik kita dari Golkar, lanjut ke Fraksi Partai Gerindra kami persilakan Pak Husni.

F-P GERINDRA (M. HUSNI. S.E., M.M):

Terima kasih Pimpinan

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII Pak Yandri dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati teman-teman Komisi VIII, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual.

Yang saya banggakan Menteri Agama Republik Indonesia dan seluruh jajarannya.

Pak Menteri ini pertama ini suara kami dari Komisi VIII, bahwa selama ini, belakangan ini Komisi VIII ini dengan para mitranya sudah membentuk group WA, baik dengan Kemensos dan Kemen PPA. Makanya senyum ketua saya Pak, bahwa kenapa kita lakukan group WA antara kami Komisi VIII dan para mitra, pertama supaya kita komunikasinya lebih lancar, yang kedua juga ada transparansi dan akuntabel di kita dalam bermitra.

Kemudian Bapak Menteri yang saya hormati, masalah anggaran yang di *refocusing* bahwa kami dari Fraksi Partai Gerindra sudah dapat menyetujui dan kami juga akan memaklumi langkah-langkah yang sudah Pak Menteri ambil. Kemudian juga anu Pak Menteri saya di Dapil Sumut I pada tahun 2020 seperti yang disampaikan Pak Ketua kami, Pak Yandri masalah bantuan mushola dan masjid. Waktu itu saya sudah ada penyetujuan lebih kurang ada tiga, tapi alhamdulillah Pak Menteri sampai hari ini kami tidak menerima apapun, yang ada kami terima WA dan SMS yang tempat yang telah kami beritahukan bahwa mushola bapak, bahwa masjid bapak akan mendapat bantuan dari Kemenag alhamdulillah. Saya bilang kalau tidak turun-turun juga dari Kemenag ambil sajalah duit dari saya, mudah-mudahan ya ini suara hati ini Pak Menteri.

Bapak Menteri yang saya hormati.

Ini juga ada yang sedikit saya tanyakan Pak Menteri di halaman 8 poin d vaksin sinovac, dan sinovam sudah diakui oleh pemerintah Arab Saudi. Alhamdulillah, kemudian disini ada kata-kata “namun saat berangkat” yang namanya namun saat berangkat berarti waktu dia mau berangkat dia harus diberikan vaksin booster dari empat jenis moderna, pfizer, johnson dan astrazenica. Yang disini menjadi pertanyaan saya, banyak sekarang para calon jamaah umroh sudah melakukan booster, apakah nanti disaat berangkat ini akan dilakukan pengulangan kembali. Karena disini ada kata-kata “namun saat berangkat” yang namanya namun saat berangkat itu bisa dua hari, bisa tiga hari nah mohon Pak Menteri ini memang ini kata ini Cuma kata-kata, tapi kata-kata juga akan memberikan sebuah kesimpulan.

Lagi ya Pak Menteri mudah-mudahan tidak bosan, tentang pelaksanaan optimalisasi asrama haji ya. Saya kebetulan duduk di Panja masalah asrama haji, Pak Menteri, dulu waktu saya kunjungan ke Medan, itu kita mendapatkan berita, saya tanya kenapa mengurus asrama haji di kota Medan yang nilainya lebih dari Rp500.000.000.000,- tapi pendapatannya sangat kecil sekali. Jadi alhamdulillah jawabannya juga bagus Pak Menteri, dia kasih tahu kami tidak begitu paham tentang mengurus asrama haji ini, karena yang ini urusannya ahli gedung, ahli perhotelan dan lain sebagainya, mudah-mudahan ini jadi masukan untuk Pak Menteri bahwa memang jangan barang yang begitu mahal kita persiapkan, tapi orang-orangnya tidak profesional. Saya juga pernah duduk dengan staf bapak, memang kalau merugi-merugi lebih bagus kita alihkan saja ke pihak ketiga, karena sayang ini pak Menteri bahwa begitu besar investasi, tapi tidak bisa dimaksimalkan.

Kemudian saya rasa sampai disitu sajalah Pak Ketua, ya banyak teman tanya lagi saya rasa sampai disitu Pak Menteri mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan saya bisa direspon dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Husni dari Gerindra, Dapil Sumut 1 tapi Pak Menteri ini Ketua Perkumpulan Orang Aceh Pak di Sumut makanya menang terus.

Baik, kita lanjut Fraksi Nasdem, kami persilakan Ibu Hj. Lisda Hendra Johni.

F-P NASDEM (Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.Mtr.):

Terima kasih Pimpinan.

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII.

Yang saya hormati Bapak Menteri Agama dan seluruh jajarannya.

Terima kasih kepada Pak Menteri atas pemaparan tadi, memang kita lihat bahwa kebijakan ekonomi tahun 2021 ini masih ditujukan kepada percepatan penanganan Covid-19. Dan kalau kita melihat banyak disini berdampak pada mengalami hambatan pada program rutinitas kementerian baik itu mulai dari pembatalan pemberangkatan jamaah haji, kemudian juga di bidang pendidikan, ya ada pembatasan tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, kemudian juga layanan di bidang keagamaan seperti terhambat dan terbatasnya peribadatan selama pandemi Covid-19 ini.

Dan untuk itu kami juga memaklumi dengan kondisi ini, cuma untuk *refocusing* anggaran ini Pak Menteri, kami melihat adanya potensi bermasalah atau setidaknya dari program yang tumpang tindih ya, memungkinkan terjadinya dobel anggaran. Misalnya saja ini untuk program dana BOS disini ada madrasah Rp3.600.000.000.000,- untuk menunjang sistem pembelajaran digital, sementara juga ada program pengembangan potensi guru dan pengembangan jarak jauh.

Yang kedua, yang kami melihat ada potensi bermasalah disini yaitu mengenai vaksinasi yang dilaksanakan untuk guru, siswa dan juga mahasiswa, karena saat ini program vaksinasi ini kita sudah dilakukan oleh banyak pihak. Dan bisa jadi guru atau siswa atau mahasiswa tersebut juga sudah melakukan vaksinasi diluar, diluar daripada Kemenag. Nah sehingga apakah disini Kemenag juga punya data yang akurat ya, yang valid apakah mereka berapa banyak yang sudah divaksin dari luar dan juga yang dilakukan oleh Kemenag sendiri? Sehingga kita harapkan bahwa program ini tidak mubazir dan sehingga tidak bertolak belakang dengan prinsip dan tujuan daripada *refocusing* itu sendiri.

Selain itu disini saya melihat ada pendidikan dari kementerian Pendidikan itu ada anggaran Rp2.400.000.000.000,- untuk pengadaan laptop untuk belajar dengan jumlah 240.000 unit, kita tentu berharap bahwa dari Kemenag ya dalam hal ini untuk siswa-siswi yang berada dibawah Kemenag ini tentu kita berharap ada bantuan, baik itu apakah handphone ataupun laptop ya seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Mungkin demikian saja dari saya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kasih Bu Hj. Lisda dari Nasdem. Kami persilakan dari Fraksi PKB, Partai Kebangkitan Bangsa.

F- PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.):

Saya Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Siapa saya itu?

F- PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.):

Saya Bu Anisa.

KETUA RAPAT:

O bu Anisa, silakan Bu Anisa Syakur.

F- PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.):

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan beserta seluruh Anggota Kmisi VIII.
Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Pertama, langsung saja saya memberikan apresiasi terhadap Kementerian Agama yang sudah berhasil menyusun anggaran yang lebih focus sehingga tentunya pagu anggaran yang sudah disampaikan tadi. Saya mencermati memang ada beberapa yang *direfocusing* misalnya masalah kerukunan umat beragama, pendidikan tinggi, pengajaran dan pembelajaran, PAUD dan juga dukungan manajemen dan lain-lain, banyak sekali yang *direfocusing*. Hal ini tentu kita semua telah memahami karena memang kondisi pandemi yang masih melanda di negara kita. Hanya kami berharap agar bagaimana walaupun terjadi *refocusing* program-program tersebut jangan sampai kemudian tidak dilaksanakan secara maksimal.

Misalnya salah satu contoh misalnya program kerukunan umat beragama dan PAUD ini bagaimana agar tidak bertentangan atau tetap menjalankan program-program the redikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini tetap berjalan, mengingat PAUD-PAUD ini adalah suatu pendidikan dasar yang masih banyak di disusupi oleh paham-paham tersebut. Ya mohon maaf karena kami kebetulan di Pasuruan di satu daerah kecamatan Rembang itu ada beberapa sekolahan-sekolahan atau PAUD yang dimasuki oleh paham-paham tersebut. Jangan sampai kemudian terlewatkan.

Yang kedua, masalah vaksinasi kami tahu bahwa alhamdulillah saya lihat guru-guru di madrasah termasuk di madrasah kami hampir semuanya tervaksinasi. Namun murid-muridnya ini masih belum, karena itu kami berharap bagaimana vaksinasi ini segera dituntaskan agar semua guru dan murid yang ada di madrasah-madrasah, baik swasta maupun negeri diseluruh Indonesia ini segera dituntaskan termasuk di pondok pesantren ini juga belum semuanya, masih ada beberapa pondok yang belum divaksinasi. Ini kami berharap bagaimana untuk bisa dituntaskan, dilakukan pendataan mana yang sudah, mana yang belum setelah itu dilaksanakan.

Selanjutnya masalah jamaroh pembatalan haji, kemarin pada rapat yang lalu mungkin dari teman-teman di Komisi VIII itu ada pemikiran bagaimana jamaroh itu tidak hanya disampaikan dengan cara memberikan sosialisasi saja, tetapi bagaimana misalnya sebagian anggaran itu untuk sosialisasi, tapi sebagian anggaran itu untuk masyarakat yang terdampak pandemi yang mereka itu saat ini masih banyak yang sangat membutuhkan, misalnya sembako dan lain sebagainya, itu kemarin ada wacana seperti itu apakah masih memungkinkan untuk bisa dilakukan. Kalau memang memungkinkan saya kira itu sangat baik sekali.

Selanjutnya tadi disampaikan tentang asrama haji, bahwa ada 2 asrama haji yang masih dialih fungsikan sebagai rumah sakit Covid-19, nah ini rencananya sampai kapan itu? Karena kan kita melihat bahwa covid ini sudah mulai melandai, apakah ada batas-batas waktu yang sudah ditetapkan bahwa nantinya asrama haji ini akan kembali dikembalikan fungsinya untuk asrama haji mengingat banyak ya kami juga tidak tahu karena sekarang umroh sudah dibuka apakah haji tahun 2022 nanti itu bisa berangkat atau tidak mungkin ada sedikit-sedikit bocoran-bocoran dari Menteri Agama kemungkinan-kemungkinan kaya apa itu? saya ingin mendapatkan penjelasan tambahan saja.

Kemudian yang terakhir tadi yang ada penawasan tentang imam masjidil haram, itu sebetulnya ada dari apa itu, Dapil kami orang yang juga termasuk hafal 30 juz, yaitu punya minat.

KETUA RAPAT:

Imam apa Bu? Imama mana?

F- PKB (Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.):

Maunya kepengen menjadi Imam di Masjidil Haram, sekarang jadi imam disini, cuma dia itu tanya kan tadi persyaratannya ada tiga, iya to, seandainya persyaratan-persyaratan itu sudah terpenuhi yang ditanyakan itu apakah boleh bawa keluarga? Itu yang ditanyakan. Saya kira itu saja terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Anisa Syakur, kita lanjutkan ke Fraksi Partai Demokrat, silakan Pak Doktor Ahmad.

F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Pimpinan serta seluruh Anggota Komisi VIII yang saya hormati.
Pak Menteri beserta Pak Wamen serta seluruh pejabat Eselon I yang terhormat.

Terima kasih Pak Menteri sudah menyampaikan *refocusing* dari kegiatan tahun 2021. Baik disini pertama rata-rata kementerian/lembaga yang namanya *refocusing* itu pengurangan, tapi Kementerian Agama justru bertambah, ini hebat juga dari Rp66.000.000.000.000,- ini dari Rp66.900.000.000.000,- menjadi Rp67.900.000.000.000,-.

Nah disini kami usul Pak Ketua iya kan supaya nampak gambaran perjalanan kementerian ini saya usul sampai sejauhmana progres tahun anggaran 2021 ini masing-masing seluruh pejabat Eselon I? Sehingga dari progres kemajuan penganggaran terutama sampai berapa yang diserap anggarannya disetiap Eselon? Berapa sekarang sudah satu semester ini Pak, semester II ini tinggal hanya 4 bulan lagi efektif, September, Oktober, November dan Desember. Kita mau tahu seperti apa penyerapan anggaran masing-masing Eselon ini? Nah setelah itu nanti baru kita tahu, mampu tidak masing-masing Eselon ini untuk menyelesaikan anggaran yang diberikan ini tambahan ini?

Kenapa apa? Karena pengalaman kita tahun 2020 itu seperti Dirjen Pendis itu Silpanya Rp1.000.000.000.000,- Pak Menteri. Rp1.000.000.000.000,- itu Pak Menteri kalau kita belikan cendol dawet ini bisa berenang didalamnya kita saking akehnya Pak, iya kan? Nah Rp1.000.000.000.000,- kalau sempat itu dulu kita apakah kita bicarakan sebelum berakhir kan ini bisa diberikan dana hibah ini kepada apa namanya kepada madrasah, pondok pesantren kita yang selama ini masih mereka itu berlantaikan tanah, berdinginkan papan gitu lho Pak.

Jadi ini usul pimpinan, ya sebelum *refocusing* ini kita akhiri ini minta kita, sampai sejauhmana progres dari masing-masing pejabat Eselon I ini anggaran dan penyearapannya? Nah dari penyerapan itu nanti baru kita bisa nanti mendapatkan gambaran terhadap tambahan-tambahan itu. Ini sangat penting maksud kita supaya jangan nanti terjadi lagi silpa tahun 2021 ini gitu. Karena walaupun sudah 4 kali *refocusing* anggaran ini, tapi kenyataannya menambah gitu. Jadi usul kami seperti itu, sehingga kita tahu gitu progresnya masing-masing Eselon ini.

Kemudian ini yang menjadi sorotan kita juga, yaitu di tabel 5 ini Pak, tabel 5 ini itu ada 6 kegiatan, nah menurut seperti kegiatan nomor 2 realisasi terkait pembatalan pemberangkatan jamaah haji 2021 itu Rp21.000.000.000,- pak, inikan Pak Menteri sudah mengumumkan pembatalan pemberangkatan haji ini sebab musababnya. Saya kira seluruh calon jamaah haji bahkan masyarakat Indonesia perlu tahu pembatalan itu, kok kita mau pakai anggaran untuk menyampaikan informasi pembatalan sampai Rp21.000.000.000,- gitu lho. Di zaman covid ini, kenapa dana ini tidak kita efektifkan untuk membantu madrasah kita, pondok-pondok kita, apa namanya penyuluh-penyuluh agama kita yang terdepan memberikan kebijakan terhadap Putusan Menteri Agama, sosialisasi segala macam, apalagi Pak Menteri tadi menyampaikan 400 kebutuhan kita apa namanya Penghulu sekarang ditangani 150, kok tidak begini yang dikejar peningkatan SDM-nya gitu lho Pak. Ini kan belum Rp1.000.000.000,- ini hanya untuk menyampaikan ke masyarakat nanti batal haji, masyarakat juga sudah tahu batal ini barang ini.

Jadi menurut saya Pak Ketua ini kita gugurkan saja ini, walaupun kita ada disitu sebagai narasumber kan, sebagai narasumber seperti tahun lalu, tapi saya kira urusan yang lebih efektif untuk hal lain Pak. Peningkatan SDM efektifitas dalam proses belajar apalagi covid ini, untuk memenuhi kebutuhan APD di pondok-pondok pesantren. Jadi kami kira nomor 2 ini digugurkan saja Pak, nah termasuk renovasi asrama haji gitu. Nah sementara sekarang kesulitan ekonomi malah kita mau merenovasi segala macam. Jadi nampak kami saya bukan apa-apa sama Dirjen PHU tidak, baik hubungan kita, nampak saya di Dirjen Haji ini kan sudah dua kali kita tidak melaksanakan haji ini. Berapa itu sisa anggaran itu pak, kok tidak kita arahkan peningkatan pelayanan haji ini untuk pengadaan pondok dari jamaah haji kita di Mekah, di Madinah, di Jedah, pemondokan kita sampai sekarang belum punya Pak.

Bangladesh negara yang termiskin sudah punya hotel disana, kita muslimin terbesar tidak punya Pak. Kenapa ini tidak diarahkan selama 2 tahun ini cukup besar ini Pak, kenapa kita membuat kegiatan-kegiatan seperti ini gitu lho.

Kemudian dari Dirjen PHU itu anggaran itu bukan sisa Pak, itu anggaran yang belum dicairkan begitu. Kalau Silpa itu kan berakhirnya tahun anggaran, ini dibunyikan sisa anggaran yang tidak digunakan untuk haji, salah dengan istilah ini. Dana yang belum terserap belum digunakan, yang belum dibelanjakan. Jadi kami menyarankan hal-hal yang tidak urgen, kami tanya juga Pak Menteri ini kegiatan prioritas kebijakan Menteri Agama Rp76.000.000.000,- Pak, ini apa barang ini Pak Rp76.000.000.000,- ini? Kalau kita belikan kerupuk Pak penuh ruangan Komisi VIII ini dengan Rp76.000.000.000,- itu saking akehnya Pak. Jadi kami mohon penjelasan ini Rp76.000.000.000,- ini untuk apa? Jadi kami diberi gambaran yang jelas, sehingga kami tidak hanya menandatangani barang yang tidak jelas.

Jadi kami kira perlu kita kalkulasi kembali realokasi anggaran yang jumlahnya tabel 1 sampai 6 ini kami kira ini tidak *urgen* sekali kegiatan ini Pak. Mungkin perlu kita tinjau kembali Pak Pimpinan usulan kami, sehingga bisa kita arahkan untuk efektifitasnya terhadap pendidikan keagamaan kita gitu lho, jadi itu saran kami. Sehingga *refocusing* ini bukan hanya kita menyampaikan kekurangan atau tambahan, tapi yang fokus kita kemana sudah ini tidak bisa kita laksanakan haji yang fokus kita kemana lagi gitu, supaya ini juga berjalan dengan baik, itu maksud kami seperti itu. itu mengenai masalah anggaran *refocusing* Pak Ketua.

Kemudian masalah apa namanya isu-isu yang penting gitu, kemudian kami juga sini Pak, kemarin juga ada surat dari Dirjen Pendis. Yaitu seluruh dosen, seluruh tenaga pengajar dan jajarannya termasuk juga para guru yang dibawah itu, tidak membenarkan, tidak membenarkan jajaran itu untuk menjadi khatib, tidak dibenarkan untuk menjadi imam di dalam shalat kita. Ini pak ada beberapa desa, kampung ya jajaran itulah ulama itu yang ada, sampai satu masjid itu tidak melaksanakan shalat *ied* karena tidak ada, yang jadi imam itu, inikan alangkah apa namanya kebijakan kita seperti ini ya merugikan masyarakat kita, ada beberapa masjid yang tidak ada khatibnya karena dianggap penghulu itu disebutnya tidak boleh didalam surat edaran itu. ini menimbulkan, kebijakan kita menimbulkan keresahan dibawah, jadi kami mengharapkan hal-hal yang seperti itu mungkin tidak perlu terjadi lagi karena akan menimbulkan keresahan dimasyarakat kita dibawah.

Kemudian yang kedua, mengenai apa Pak, Pak Dirjen Pendis mengenai masalah apa namanya beasiswa. Ini sangat kami terima kasih sekali anggaran yang besar Cuma kami mengharapkan anggaran, apa namanya untuk siswa kita yang di Timur Tengah, yang ke Timur Tengah kami rasa ya diberi kelonggaranlah dari aturan-aturan itu, bukan artinya apa dibebaskan sama sekali, tapi tidak ada hal-hal yang sangat menyulitkan mereka itu, sedangak dari kemampuan intelektual mereka mampu tapi ada

hal-hal yang mereka tidak bisa di Timur Tengah. Mungkin perlu nanti persyaratan-persyaratan kita tinjau sehingga tidak mengurangi keraguan kita terhadap nasionalis dan kebangsaan dia. Karena itu yang selalu menjadi masalah-masalah beasiswa ini.

Terakhir kalau tadi Pak Hasan Basri mengatakan bahwa UIN Jambi itu yang terbaik di Indonesia, nah kami usul Pak Menteri, kami kemarin kesana ke UIN sudah bapak tidak tanggung-tanggung rektor yang baru sudah aman sekarang kami target kami, kami kemarin menjadikan UIN itu menjadi Univercity Internasional. Kenapa? Karena geografinya, terletak diantara 4 negara, Singapore, Malaysia, Thailand, Philipina yang sebagian juga non muslim. Jadi kami waktu itu sudah mendiskusikan supaya ada magnetnya kesana jadi kami serahkan ini nanti Pak proposalnya untuk menuju UIN menjadi *Go Univercity Islam Internasional*. Itu mohon juga nanti pada Pak Menteri kelanjutannya kami sudah kemarin diskusi sudah merumuskan ya mudah-mudahan kedepannya bisa terwujud. Kami kira demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih, oh nyeraikan juga saya kira tadi mau giliran mungkin hari Kamis kita Raker lagi, giliran Pak Achmad maksud saya. Tapi kalau tidak tahan sekarang saja Pak Achmad silakan, tolong difoto yang disebar ke Dapil. Waduh covernya saja yang ngeri itu, mana stafnya Pak Achmad kok nggak moto, ya sudah di foto, o sudah.

Baik, terima kasih Pak Achmad dari Riau yang sudah juga menyerahkan aspirasinya, baik kita lanjutkan ke Fraksi PKS, kami persilakan Pak KH Bukhori.

F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII.

Pak Menteri, Pak Wamen dan juga beserta jajaran yang saya hormati.

Pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Wamen ini Pak, Pak Wamen ini baru saja menyelesaikan promosi Doktornya pada

tanggal 5 Agustus kemarin, cuma sayang saya tidak diundang untuk syukurannya Pak. Dan selamat juga untuk Pak Menteri yang sudah sembuh dari sakit, mudah-mudahan sembuh terus ya Pak ya, sehat semuanya, kalau melihat posturnya kalau melihat sakitnya itu kayaknya tidak pantes ya kuat.

Pak Menteri dan jajaran pertama terkait dengan *refocusing*, tentu kita masih tetap bersyukur karena walaupun ada pengurangan anggaran tetapi pada akhirnya ada penambahan Rp1.000.000.000.000,- lebih ini. Jadi kalau pengurangannya penyesuaiannya *refocusing* Rp1.900.000.000.000,- terus kemudian ada penambahan Rp2.400.000.000.000,- sehingga anggaran semula yang Rp66.000.000.000.000,- menjadi Rp67.000.000.000.000,- lebih atau hampir Rp68.000.000.000.000,-. Saya kira ini juga perlu disyukuri karena posisi yang cukup bertengger ini ya di posisi 3 besar dalam kementerian atau 4 besar. Namun dalam realokasi anggaran ini saya perlu mencermati ini, saya tadi sepakat dengan Bu Annisa itu terkait pertama desiminasi terkait pembatalan keberangkatan jamaah haji. Ini sebenarnya juga senada dengan Pak Achmad Cuma dengan bahasa yang berbeda.

Jadi barangkali mungkin kalau program itu tidak semuanya berupa desiminasi yang sifatnya tutorial gitu Pak, tapi ada yang dibawah bantuan masyarakat sehingga itu jauh lebih bermanfaat gitu. Mungkin kalau misalnya per ini ada 5 atau 6 titik kegiatan itu misalnya bisa saja, kegiatan itu desiminasinya misalnya 1 lalu kemudian yang lainnya itu berupa bantuan, disamping itu sifatnya tambahan ya. Jadi tidak perlu mengubah nomenklatur yang ada di Kementerian Keuangan, tetapi kemudian bagaimana itu misalnya menjadi lebih, ini apa lebih fleksibel, tetap saja nomenklturnya itu tetapi kemudian ada bagian yang diberikan kepada masyarakat. Saya kira kalau itu memang bisa dilakukan itu saya kira jauh lebih baik dan lebih bermanfaat ya. Jadi kegiatan desiminasinya tidak hilang tetapi lebih berkualitas, itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan renovasi dan perbaikan tata ruang layanan haji, kita juga belum mendapatkan rinciannya, saya kira ini nanti rinciannya bisa kita bahas dengan pembicaraan dengan Eselon I Pak kalau kemudian memungkinkan ini. Karena sedianya bahwa tadi memang idealnya bahwa kita mendapatkan gambaran tentang penyerapan masing-masing anggaran di kementerian yang dilaksanakan oleh Eselon I, eselon berdasarkan eselon itu, nah dari situ sebenarnya realokasinya bisa menjadi lebih relevan, atau lebih tepat. Mana yang sebenarnya bisa ditambah, dan mana yang sebenarnya cukup sehingga keawatiran yang disampaikan oleh Pak Achmad tidak terjadi. Jadi tidak terjadi satu apa namanya silpa diakhir masa periode anggaran itu, karena ketika terjadi satu silpa itu saya kira nanti juga akan berkaitan dengan kualitas kementerian itu sendiri.

Hal yang lain misalnya juga saya melihat kalau misalnya terkait dengan sarana prioritas kebijakan Kementerian Agama misalnya, apakah ini termasuk yang dimaksudkan seperti tempo hari misalnya ada KUA, ya KUA kalau itu iya saya kira memang perlu ya karena KUA ini paling tidak menjadi etalase

Kementerian Agama. Tapi kondisinya secara umum, ya walaupun tidak semua memang masih memprihatinkan dari segi status kepemilikan, sisi gedung, maupun kemudian SDM, saya kira ini memang perlu mendapatkan penguatan-penguatan. Itu terkait dengan apa namanya realokasi dan juga apa namanya *refocusing* terhadap anggaran ini. Yang intinya sebenarnya apa yang canangkan disini ini pak memang belum ada rinciannya, akan lebih bagus kalau kita mendapatkan rincian yang lebih jelas.

Yang kedua, Pak Menteri juga salah satu hal yang tadi disampaikan Pimpinan ya, sudah beberapa kali saya sampaikan tentang masalah keadilan anggaran. Keadilan anggaran dalam bidang pendidikan, saya kira itu menurut saya harus kemudian mulai kita buka ya, jangan sampai tabu. Dan terdepan saya kira Pak Menteri Agama harus terdepan harus bisa mengadvokasi hak-hak anak-anak di Madrasah kita. Kalau anggaran 20% itu kan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) itu jelas Undang-Undang Dasar, bahwa sistem pendidikan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional. Artinya ketika satu sistem pendidikan nasional itu kan tidak membeda-bedakan tidak memberikan antara sistem pendidikan agama dan non agama. Tetapi fakta didalam pembagian anggarannya kan berbeda, anggaran untuk pendidikan agama menurut saya mengalami "diskriminasi" ya, tidak mendapatkan perhatian yang memadai, sementara jumlahnya cukup besar, jumlah pendidikannya juga seimbang baik tingkat dasar, tingkat menengah maupun menengah atas.

Jadi saya kira ini perlu mendapatkan advokasi tersendiri, agar hak-hak anak kita yang sekolah di agama ini juga mendapatkan hak yang sama dengan teman-teman yang lain. Jadi saya kira itu saya mengapresiasi dan mendorong kepada Pak Menteri dan gus Menteri ini kan luar biasa menurut saya. Jadi kalau beliau yang bergerak saya kira Menteri Keuangan dan yang lainnya juga ngikut ini, jadi ini kesempatan gus Menteri ini, jadi kesempatan untuk kemudian mengadvokasi sekolah-sekolah agama untuk mendapatkan anggaran yang lebih adil. Nah oleh karena itu kemudian nanti Menteri Agamalah yang akan menjadi user utamanya.

Yang ketiga, ini terkait dengan masalah beberapa hal ya, beberapa waktu yang lalu ini ketika saya di Dapil di kasih apa namanya beberapa orang meng WA kepada saya terkait dengan masalah sosialisasi tentang distribusi BOP. BOP Madrasah, BOP Pesantren termasuk taman Quran itu, dan sementara kami di Komisi VIII terus terang saya tidak tahu itu Pak. Saya tanya kepada Pimpinan juga tidak tahu juga itu, tapi menyebar dilapangan, tapi setelah berikutnya itu kemudian tidak ada lagi di publik gitu. Tapi ternyata setelah berikutnya saya dapat informasi juga dan di WA ternyata memang di apa namanya di Dirjen Pendidikan khususnya pontren ini, ini telah membagikan 14.115 Daring yang masing-masing lembaga pendidikan mendapatkan Rp15.000.000,- dan itu dibayarkan setiap bulan Rp5.000.000,-. Lalu kemudian ada 62.153 BOP yang dibagikan kepada MDT, dan kemudian ada 112.008 yang dibagikan kepada LPQ yang masing-masing lembaga

mendapat Rp10.000.000,-, ini sama sekali tidak tahu. Nah saya mohon konfirmasi ini, ini apakah benar atau tidak? Nah kalau benar Komisi VIII ini benar-benar tidak tahu ini Pak, ini saya tidak tahu sama sekali. Nah oleh karena itu saya mau konfirmasi ini sekaligus jika memang benar saya kira tidak demikian halnya, jadi Komisi VIII justru mendapat informasi dari masyarakat dan kemudian dari media dan seterusnya itu.

Yang terakhir, Pak Menteri saya kira terkait dengan asrama haji, saya sejak masuk di Komisi VIII tahun 2019 akhir itu pertama kali yang saya ingat betul ketika dengan Menteri pertama itu adalah terkait asrama haji di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu jumlah satu angkatan haji kurang lebih sekitar 30.000, Pak Menteri pasti tahu persis karena beliau adalah orang Jawa Tengah. Dan 30.000 tetapi sampai hari ini kan juga belum punya asrama, ada satu asrama yang di Solo itu juga dipinjemi sama Pemda itu. Jadi saya pikir ini perlu mendapatkan prioritaslah, saya sudah mendorong berkali-kali sejak akhir 2019 sampai hari ini konsisten terhadap itu, agar apa? Agar apa namanya jamaah kita mendapatkan hak-haknya.

Tetapi kemudian didalam membangun asrama haji Pak Menteri, mohon ini kemudian diperhatikan kami di Komisi VIII sedang memiliki Panja yang namanya Panja Asrama Haji. Asbabul wurudnya Panja Asrama Haji ini adalah setelah kita melihat dua fenomena besar. Fenomena pertama adanya pembangunan asrama haji yang mengalami keterbengkelaian di beberapa daerah. Yang kedua karena pengelolaan asrama haji utamanya ketika pas masa covid ini mengalami devisit yang sangat dalam. Dan ini tentu akan membebani kepada APBN, karena itu kita sedang mencari satu formula, formula seperti apa yang kemudian dipakai dalam rangka untuk mengelola asrama haji, sehingga tidak memberatkan kepada APBN, tetapi juga tidak menyalahi aturan. Apakah itu kemudian nanti di BLU-kan? Ataupun kemudian itu dikerja samakan? Nah itu kemudian tentunya belum menjadi sebuah kesimpulan kami, tetapi kami Panja ini masih tetap mencari alternatif-alternatif yang lebih baik.

Saya kira itu Pak Pimpinan, mudah-mudahan kalau ada yang kurang berkenan mohon di maafkan.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak KH. Bukhori Yusuf dari PKS, kami persilakan selanjutnya dari Fraksi PAN, silakan Pak Rizal.

F-PAN (H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI,

Yang saya hormati bapak Menteri, pak Wamen, dan seluruh jajarannya.

Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tanyakan, mungkin untuk memperjelas saja, karena tadi sudah banyak dipertanyakan oleh bapak dan ibu yang lain.

Yang pertama, masalah umroh Pak, di lapangan kami sering ketemu dengan beberapa travel mereka menanyakan kapan kira-kira kita melaksanakan umroh? Tadi disampaikan oleh Pak Menteri seperti misalnya sementara ini kita kan sudah menggunakan vaksin sinovac dan sinovam. Sementara kita kalau harus berangkat, kalau menurut tadi pernyataan Pak Menteri harus menggunakan modena, pfizer, astra zeneca, dan johson. Berarti vaksin yang sudah kita lakukan itu berarti tidak bisa dipakai, jadi kita harus menggunakan vaksin seperti yang diharapkan oleh Kerajaan Saudi.

Kemudian ada juga pertanyaan umroh ini kan biayanya mencapai di berita ini Pak, kami belum tahu persis kira-kira berapa? Itu diberita dikatakan mencapai Rp60.000.000,- ini juga cukup memberatkan, ini kira-kira penjelasannya apa? Mungkin kami juga ingin tahu, sehingga kami menyampaikan kepada masyarakat ini cukup jelas.

Kemudian yang kedua Pak, guru-guru agama, kami lihat sudah bagus upaya Kementerian Agama mencoba untuk mengakomodasi guru-guru agama, tetapi memang masih banyak Pak yang harus dipenuhi. Mungkin anggarannya bisa dialokasikan untuk penerimaan guru-guru agama, karena masih banyak sekali yang mengeluhkan, kadang-kadang kami sebagai guru agama ya dengan ikhlas saja, dapat biaya-biaya urunan sisa-sisa dari biaya operasional. Mungkin ini perlu menjadi perhatian Pak Menteri.

Kemudian berikutnya Pak, pendaftaran pondok pesantren, seperti contohnya di Banten, Banten di Kabupaten Tangerang itu didata oleh teman-teman pondok itu lebih kurang 2.000 lebih. Tapi yang terdata hanya 672 kalau tidak salah, nah ini saya tanyakan permasalahannya apa? Menurut mereka ini terlalu ketat, apa namanya secara pendaftaran, kalau dulu waktu ditangani oleh daerah katanya lebih cepat. Dan item yang harus menjadi syarat itu ada lebih kurang 6 atau 7, tapi setelah ditangani oleh pusat sekarang ini menurut mereka sampai 26 atau 27 item yang harus di download, mungkin ini perlu dipikirkan supaya mereka nanti bisa masuk atau terdaftar sebagai pondok pesantren.

Kemudian ini SDM penghulu Pak di KUA, nah ini ada penerimaan Rp150.000,- tetapi mungkin perlu dipikirkan juga Pak saya ketemu dengan

beberapa mereka, kesejahteraan mereka juga terlalu kecil. Misalnya tunkin mereka kalau tidak salah Rp500.000,- kemudian mereka dapat dari hasil melakukan ijab itu, itu kecil sekali dibagi dengan beberapa penghulu yang lain. Karena ini keluhan-keluhan mereka mungkin akan menjadi perhatian dari Pak Menteri.

Nah yang terakhir, di KUA Pak umumnya aset mereka itu adalah aset pemerintah daerah, nah problem mereka kalau mereka ini melakukan pembangunan, ini ada kesulitan, karena itu bukan aset dari Kementerian Agama. Jadi ini mungkin perlu dipertimbangkan atau perlu dipikirkan supaya ada negosiasi Kementerian Agama dengan pemerintahan daerah. Supaya ada alih aset dari Pemda ke Kementerian Agama. Saya kira itu dari kami terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Muhammad Rizal dari Fraksi PAN, selanjutnya dari PPP ada virtual? Pak KH Muslich? Tidak ada. baik dari meja Pimpinan Pak Ace cukup? Ya silakan.

F- P. GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII.

Yang terhormat Pak Mentreri Agama dan juga seluruh jajarannya.

Untuk mempersingkat waktu mungkin saya langsung saja kepada intinya, dan tadi kalau persoalan Tusima sudah sama rekan kami barangkali ya, dan disini saya juga menyetujui bahwasannya sebaiknya memudahkan komunikasi, ini setidaknya ada WA *group* mungkin ada dari teman-teman dilanjut ke Komisi VIII sebagaimana yang dilakukan oleh kita dengan Kemensos dan juga Kemen PPA.

Saya akan langsung kepada mungkin ini sekedar temuan di lapangan terkait dengan kebijakan P3K Guru tahun 2021, di lingkungan Kemenag ini hanya bisa diikuti oleh guru honorer K2. Sedangkan untuk kebijakan kategori ini di Kemendikbud bisa diikuti oleh siapapun yang penting guru tersebut sudah terdata di data Apodik. Nah ini menyebabkan banyak guru di lingkungan Kemenag tidak bisa daftar atau tidak bisa ikut di P3K Guru.

Kemudian juga untuk penempatan guru yang lulus P3K ini hanya ditempatkan di sekolah negeri, sedangkan sekolah negeri di lingkungan Kemenag ini hanya sedikit. Sebagai gambaran di Kabupaten Majalengka baik itu tingkat SD, SMP mungkin itu kalau di MI itu jumlahnya yang negeri itu lebih sedikit, sedangkan untuk yang negeri ini jumlahnya sangat banyak. Jadi ini memang itu sangat apa kapasitasampungnya menjadi sangat terbatas, ya tentunya sebaiknya ini bisa ditempatkan juga di sekolah swasta agar bisa tertampung dan maksimal keberadaannya, dan syukur-syukur bisa ditempatkan disekolah umum negeri. Ya tentunya ini harus ada treatment khusus dengan Kemendibud.

Kemudian juga terkait penerima insentif honor guru agar diperbanyak, karena sekarang ini ada kebijakan pemberian insentif guru sudah ada di pusat. Sebagai gambaran di Dapil saya di Majalengka jumlah guru honor ini sudah ada 1.700 tapi hanya diberi kuota 1.100 saja.

Dan yang terakhir bantuan sosial PIP agar dapat alokasi yang sama dengan sekolah yang dibawah Kemendikbud, sampai sekarang perbedaannya sangat jauh sekali. Demikian mungkin dari saya, saya harap dari Kementerian Agama untuk ditindaklanjuti. Terima kasih Pimpinan.

*Wallahumuafiq ila aqwamithariq.
Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Jefri Romdoni dari Fraksi Gerindra, ada tambahan dari Golkar?

F-PG (MUHAMMAD ALI RIDHA):

Singkat saja Pimpinan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi VIII
Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya.

Saya tidak akan mengulangi tadi beberapa dari yang diusulkan oleh kawan-kawan, saya hanya ingin minta waktu sedikit untuk menyampaikan beberapa hal kepada Kementerian Agama.

Yang pertama, beberapa waktu lalu masa reses kami turun ke Dapil Pak Menteri, dan tanpa sengaja saya melewati satu madrasah di Kabupaten Sampang saya Dapil Madura, nama saya Ali Ridha Pak Menteri. Kebetulan hari itu adalah hari libur sehingga saya tidak bisa mengunjungi langsung, saya melihat dari luar kondisi dari MAN Sampang itu, itu berbeda dari MAN yang kabupaten yang lain, sehingga perlu untuk perbaikan-perbaikan. Tampak luar itu sudah sangat memprihatinkan, itu yang perlu saya sampaikan.

Yang kedua, terkait dengan beberapa program yang ada di Kementerian Agama, beberapa program itu kita kalah cepat dengan informasi dari Dapil Pak Menteri. Tadi sudah sekilas disampaikan itu salah satunya. Saya bulan Juli itu sudah mendapatkan informasi dari bawah konstituen saya menanyakan itu yang mana saya belum tahu itu. terkait misalnya BOP tadi, itu saya WA-nya masih ada belum saya hapus, menanyakan bahkan beserta persyaratan-persyaratannya lengkap. Ini buat saya, saya anggota Komisi VIII kalah cepat dengan beberapa kawan-kawan saya yang ada di konstituen saya yang ada di Dapil. Sehingga tentu saya tidak mungkin mengatakan tidak tahu, saya mencari cara atau kalimat yang mencoba untuk menutupi ketidak tahuan itu. Lalu pada masuk Agustus pertengahan baru ternyata informasi itu benar.

Yang kedua BOP yang tahun ini itu berbanding jauh dibanding yang tahun lalu, mungkin terkait dengan anggaran yang ada, tetapi tetap saja Pak Menteri kalau tadi Pak KH. Bukhori menyebutkan karena angka itu saya tidak tahu, ada 62.000 MDT, ada 112.000 TPQ dan lain-lain kita ini dapat pembagian itu hanya jumlahnya sangat sedikit, kalau tidak salah MDT, 9 atau 10, nah tentu Pak Menteri yang ingin saya sampaikan kami tidak minta proyek, tidak tetapi salah satu bahwa kita ini melekat fungsi yang ada pada kita fungsi selain anggaran adalah pengawasan.

Nah maksud kami tolong libatkan Anggota Komisi VIII, toh itu nanti katakanlah program-program yang ada tidak jatuh kepada kita, tapi kepada lembaga-lembaga yang mekanismenya juga mereka sudah diatur oleh Kementerian Agama mendaftar secara on line. Kita hanya ingin bahwa kehadiran kita, keterwakilan kita di Dapil itu terlihat kita bekerja, karena kalau tidak suara di Dapil kita ini duduk rapat-rapat saja dan mendapatkan gaji serta snack dan makanan yang enak. Enggak kita berharap bahwa keterwakilan kita duduk disini dapat mewakili Dapil kita, karena itu fungsinya. Ada banyak hal lagi selain kemudian BOP, kemarin ada bantuan Sarpras hanya 5, saya tulis ini madrasah 1, MA 2, madrasah tzanawiah 2 kita Anggota DPR lhio ini, Anggota DPR Komisi VIII yang bermitra dengan Kementerian Agama hanya dapat jatah itu. Bukan soal jumlah jatah itu, toh sekali lagi bukan melalui kita, jatah itu kemudian kita salurkan kepada Dapil dan Dapil yang mendaftarkan langsung. Nah kemudian setelah itu Dapil kita dari Kementerian Agama menyalurkan langsung kepada sekolah itu. Kita Cuma minta macam di foto saja pak Menteri untuk menunjukkan bahwa kita bekerja di Dapil .

Jadi dengan anggaran yang begitu besar kalau tadi yang ada pengurangan *refocusing* tadi sudah disampaikan sebenarnya ada tambahan Rp2.400.000.000,- yang tadinya tidak turun sebenarnya. Nah kita berharap kita dilibatkan Pak Menteri, baik dalam urusan kependidikan dan lain sebagai, itu bisa kita dilibatkan supaya kita fungsi kita duduk disini itu memang benar-benar perwakilan dari Dapil kita, karena salah satu sumpah kita adalah memperjuangkan Dapil. Kemarin itu Pak Menteri mohon maaf kalau bahasanya agak keliru nanti tinggal di kalau ada renovasi -renovasi kalimat saja. Kita malu Pak Menteri, kita dapat Sarpras itu hanya 5, 1 Madrasah Iftidha, Madrasah Aliyah 2, Madrasah Tsanawiyah 2, sehingga kita dianggap ya bekerja tidak maksimal untuk Dapil. Maksud saya Pak Menteri, saya tidak emosi, walaupun itu emosi, ini emosi cinta saya kepada Pak Kementerian Agama, dan juga emosi cinta saya kepada rekan-rekan yang duduk di Komisi VIII ini untuk mewakili keterwakilannya di Dapil supaya mereka, supaya Dapil kita, konstituen kita tahu bahwa kita bekerja untuk Dapil itu. sesuai dengan sumpah.

Sementara itu saja karena ada beberapa yang lain tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, mohon maaf Pak Menteri dan seluruh jajarannya apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih Pimpinan, Wallahul muafiq ila aqwamithariq.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Dari Pimpinan Pak Marwan ada? Cukup. Baik Pak Menteri sudah semua bertanya dan dari meja Pimpinan cukup semua, mungkin yang kami pertegas kembali itu vaksin itu Pak. Saya kira kalau pihak Menteri Agama bekerja sama dengan Menteri Kesehatan dan TNI, Polri, di Madrasah-madrasah, kemudian di kantor Kemenag atau UIN atau STAIN itu saya kira isu nasionalnya kena pak Menteri. Karena nasionalnya baru 10% dan faktanya sekarang di lapangan itu banyak orang yang tidak mau vaksin itu pak karena tidak percaya. Jadi kalau Kementerian Agama bergerak ada para Kyai, para Ustadz, Madrasah juga masif saya kira ini akan mempercepat target nasional Pak. Itu harapan kita bisa di tindaklanjuti dengan para pihak yang memang berkompeten dibidang vaksin.

Kemudian yang terakhir tadi memang banyak ditanyakan oleh Anggota, masalah BOP dan Madrasah, ya pasti memang sangat jomplang dengan tahun lalu, karena tahun lalu itu hanya 2.600.000.000.000,- yang dari pihak BUN iya kan untuk BOP pondok, ini beda. Sekarang BA BUN-nya belum ada, tapi mudah-mudahan pejuang-pejuang di depan ini apa namanya, Gus Menteri ini in sya allah masih ada harapan untuk terus menambah harapan kepada pondok pesantren. Oleh karna itu kami persilakan kepada

Pak Menteri untuk merespon terhadap pandangan atau pertanyaan dari masing-masing fraksi. Silakan Pak.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Baik terima kasih Pimpinan. Soal vaksin saya jawab terlebih dahulu memang kita tahu bahwa mandatori vaksin ini sekarang ada di Kementerian Kesehatan, TNI dan Polri. Tapi tidak antimia kita juga dorong, tadi kita juga Ratas sama Presiden juga salah satunya terkait dengan vaksin dan kita mendorong ini supaya dipercepat pesantren dan perguruan tinggi. Karena faktanya juga kita punya fakta Pak Dirjen Pendis ya, kita baru 10% mahasiswa dilingkungan PTKIN yang divaksin. Nah in sya allah kita akan dorong terus mungkin dalam waktu minggu ini kita akan rapat bersama dengan Menteri Kesehatan untuk mempercepat ini. Nah pesantren juga sama, pesantren itu di Jawa Timur yang sekarang lagi digenjut tadi disampaikan Bu Ina ya, di Jawa Timur itu baru 117 pesantren yang di vaksin, bunyinya saja sudah gedanya minta ampun gitu kan. Tapi faktanya itu baru 117 pesantren dari ribuan pesantren di Jawa Timur Bu.

Jadi kita memang dorong terus supaya pesantren ini juga mendapatkan vaksin segera, memang ada beberapa faktor-faktor teknis yang membuat ini agak tersendat, tapi insya allah dari pemerintah tidak akan membedakan atau menganaktirikan pesantren in sya allah, kita akan dorong terus supaya pesantren segera mendapatkan vaksin, dan ini tentu negara akan kami koordinasikan dengan Anggota Komisi VIII. Kalau yang di Jatim ini memang karena kepentingan untuk mempercepat vaksinasi itu, jadi mudah-mudahan cepat supaya memutus.

WAKIL KETUA KOMISI VIII/ F- PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY,

M.Si):

Gus Menteri saya ingin menyambung yang disampaikan soal vaksinasi, kebetulan saya Ketua Umum FKUIN jadi kita beberapa kali mengadakan acara vaksin. Nah yang harus menjadi catatan begini Pak Menteri itu biaya suportingnya itu tidak mudah, nah yang harus dipikirkan oleh Gus Menteri adalah bagaimana memastikan biaya suporting. Kami misalnya ya 1.000 vaksin itu biaya suportingnya itu antara Rp70.000.000,- sampai Rp75.000.000,-. Nah saya tidak tahu dimana kita bisa mencarikan sumber anggaran untuk kepentingan seperti itu? pertama itu.

Yang kedua, saya kira ini yang cukup penting, dan saya kira teman-teman Komisi VIII juga ikut serta didalam proses membantu masyarakat dalam hal vaksinasi. Nah kenapa kemarin misalnya kaya saya berinisiatif untuk melakukan vaksinasi? Kalau Kementerian Agama yang menyelenggarakan Gus Menteri, itu ada nilai plusnya. Apa? Soal

kehalalannya, ya kalau yang lain bikin ya biasa, Kementerian Kesehatan biasa begitu, tetapi kalau Gus Menteri turun di pesantren, di madrasah dimana-mana mau vaksin, karena misalnya ada beberapa kemarin Pak Kyai Bukhori itu di group sempat melemparkan, misalnya kehalalan astrazeneca, kehalalan moderna, pfizer itu dipertanyakan itu, karena MUI baru mengeluarkan ini.

Nah jadi prinsip dasarnya adalah bahwa kalau Kementerian Agama itu yang menyelenggarakan ini, itu otentisitas religiusnya itu lebih kuat. Apalagi kalau dilakukan di pesantren. Jadi usul saya Pak Menteri, Gus Menteri mungkin perlu dipertimbangkan, juga teman-teman di Komisi VIII dalam konteks vaksinasi, misalnya saya dengan teman-teman UIN di Bandung, UIN apa namanya UIN pesantren dan lain-lain. Itu saya kira penting, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya silakan lanjut Pak Menteri. Siap, terima kasih Pak Ace. Jadi betul soal biaya suporting ini memang tidak mudah, nah oleh karena itu seperti di Jawa Barat misalnya Kanwil kami di Jawa Barat melaksanakan program 3.000.000 vaksinasi kepada pesantren dan masyarakat itu kerja sama dengan daerah. Jadi vaksinasinya kita yang mendorong, biaya suportingnya kepala-kepala daerah ini yang akan menanggungnya, ini salah satu cara yang kami lakukan. Tentu ini juga akan kita lakukan di tempat lain, kita lagi proses semua Bu, mudah-mudahan ini selain biaya suporting saya kira juga kedatangan vaksin ini juga menjadi kunci Pak Ace. Jadi semakin cepat vaksinnya datang, semakin mudah kita mengkoordinasikan.

Kemudian soal kehalalan vaksin betul, jadi memang keluar beberapa hari ini keluar fatwa MUI terkait itu bahwa vaksin 3 vaksin ya, astrazeneca, Pfizer sana moderna yang keluar dari MUI itu yang dinyatakan boleh tapi najis, najis tapi boleh atau gimana itu kalau saya bingung juga. Nah itu saya kira usulan Pak Ace menarik ya dengan pasal kedaruratan akan mudororatlah itu, tapi saya kira ya betul tadi strategi untuk menggunakan Kemenag untuk menghalalkan dengan cara lebih mudah betul saya kira. Nanti kita akan coba dorong ini Pak Ace dan Bapak/Ibu sekalian.

Kemudian soal jamarah tadi, soal transport jangan pakai buku tabungan ada Pak Dirjen mana pak itu laksanakan itu Pak, jangan dipersulit. Yang sulit-sulit dibikin gampang, dan yang gampang jangan dipersulit.

Soal renovasi ini saya perlu jelaskan ke Bu Ina, jadi memang ada beberapa renovasi ini bukan ke Kantor Kemenag ini, tapi ke asrama-asrama haji yang memang kita harus persiapkan. Karena selama dua kali ini tidak ada atensi, dua tahun Pak, selama 2 tahun ini tidak ada atensi kepada mereka, dan lebih banyak bangunan yang sudah mulai rusak, kita harus mempersiapkan jika tahun depan kita bisa menyelenggarakan ibadah haji Bu.

Jadi renovasi ini kita arahkan kesana, jadi bukan ke kantor-kantor kementerian atau yang lain itu, tapi kepada asrama-asrama haji.

Kemudian soal madrasah, yang dibiayai oleh world bank, saya perlu sampaikan bu, di Kementerian Agama tahun 2021 ini sudah menyiapkan anggaran bantuan afirmasi madrasah, nilainya kurang lebih Rp399.900.000.000,- ini diimplementasikan melalui *program realizing education's promise, madrasah education's quality reform* ini direncanakan untuk 2.666 madrasah. Bantuan afirmasi madrasah untuk 2.666 madrasah ini masing-masing madrasah akan mendapatkan Rp150.000.000,- ini sekaligus sebagai laporan. Nah bantuan ini diberikan kepada madrasah yang sudah menerapkan sistem evaluasi dini madrasah, dan sistem e-rekam (rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik) yang sudah dilatihkan pada tahun 2020, dan mulai diaplikasikan tahun ini. Ini akan diberikan dalam bentuk uang tunai, namun demikian pemanfaatannya harus didasarkan pada kebutuhan mendesak madrasah, yang dirumuskan berdasarkan hasil EDM serta sesuai Juknis yang ditetapkan. Jadi nanti kalau mau lebih detail silakan komunikasi langsung dengan Pak Dirjen Pendis, kami membuka diri untuk ini Bu.

Lalu kemudian BLU dari Pak BA tadi, jadi memang tidak boleh mengangkat honorer ini bukan Menteri pak, tapi undang-undang ASN memang tidak membolehkan. Jadi bukan keputusan menteri tapi ini undang-undang, jadi kami juga tidak berdaya untuk hal ini. Ini kemudian dari Gerindra Pak Husni soal group WA, kita sih oke saja tidak ada masalah wong group WA, cuma masalahnya group WA ini dibuka atau tidak, karena namanya group WA itu kan kadang dibaca kadang tidak nunggu waktu sempat. Jadi kalau argumentasinya untuk mempercepat komunikasi saya kira tidak juga, lebih enak saya kira kita ini kan punya telpon masing-masing kalau kita bisa komunikasi langsung itu lebih mudah, kelihatan direspon atau tidak.

Bapak/Ibu sekalian telpon menteri, WA menteri misalnya tidak dijawab, tidak diangkat ketahuan, kalau di group tidak ketahuan itu Pak. Jadi Ibu posting apa? Bapak posting apa? Dibaca apa tidak, tidak ketahuan, itu saja saya kalau bicara soal efisiensi ya mending catat nomor saya kalau ada apa-apa telpon saya atau Pak Dirjen, Pak Sekjen lebih enak daripada group WA. Itu nanti ruwet, nanti banyakan perang stiker kalau disitu Pak. Dari pada substansinya gitu kan.

Nah soal *booster* vaksin, jadi begini saya komunikasi terakhir terkait dengan umroh saja ya, saya bicara umroh saja jadi Kementerian Haji Arab Saudi ini menunggu keterangan tertulis dari Kementerian Kesehatan Saudi terkait dengan Sinovac plus *booster*. Jadi keterangan tertulis ini masih belum didapatkan Kementerian Kesehatan Arab Saudi, jadi Kementerian Haji masih menunggu. Problem internal merekalah kira-kira satu minggu lagi akan tuntas. Kemudian jika sudah diterima secara tertulis, in sya allah umroh untuk Indonesia akan dibuka, nah ini nanti kita akan bicarakan setelah kami datang ke Saudi, mudah-mudahan kita akan diikhtiarkan.

Lalu komunikasi terakhir kami juga mendapatkan info bahwa QR-curt, sertifikat vaksin mutlak ada diperlukan dua sertifikat sinovac plus booster kalau kita pakai sinovac. Atau kalau kita pakai sinovam ya sinovam plus booster, boosternya yang satu diantara 4 itu tadi. Saya kira ini menjadi otoritas Pemerintah Arab Saudi ya menentukan *booster* itu, jadi memang kalau mereka maunya satu diantara 4 booster itu ya paling kita paling mampu kita hanya apa ya? Apa sih Bahasa Indonesianya apa ngremik itu apa Pak Bahasa Indonesianya apa? Merajuklah gitu, melobi-lobi nah kita melobi supaya tidak usah pakai itu gimana? Jadi nanti kita akan ikhtiarkan Pak namanya juga ikhtiar hasil itu bukan tanggungjawab kita Pak, ikhtiar akan kita usahakan bagaimana booster itu tidak harus 4.

Kemudian komunikasi kita yang terakhir juga kita dapatkan bahwa tidak ada karantina bagi yang sudah 2 kali vaksin. Jadi yang sudah 2 kali vaksin tidak perlu karantina sebagaimana tadi disampaikan oleh tadi Pak Rizal yang umroh sampai 62 hari, 62 hari memang waktu itu Pak itu 14 hari karantina di negara ketiga, 8 hari karantina disini setelah pulang di karantina. Jadi untuk karantinanya sudah 22 hari, jadi plus umrohnya 10 hari jadinya 32 hari pak, biayanya menjadi Rp67.000.000,- pak ha umrohnya 4 jam. Nah ini komunikasi terakhir kita mencoba mengatasi hambatan-hambatan ini Pak tadi yang saya sampaikan. Jadi termasuk tidak ada karantina bagi yang sudah 2 kali vaksin hanya butuh booster saja.

Lalu negara yang sudah bisa masuk per hari ini Pak ya, itu Irak, Sudan, Nigeria, dan Algeria itu kurang lebih, kemudian paket umroh 14 hari dibolehkan umroh satu kali shalat bebas setiap waktu. Jadi paket umrohnya itu tidak 32 hari seperti yang tadi saya sampaikan Pak, tetapi bisa 14 hari tapi hanya satu kali umroh, umroh wajib saja itu satu kali umroh tapi keluar masuk untuk shalat bebas. Nah ini saya kira kita harus diskusikan kembali soal ini, jadi memang agak berat Pak, tapi ya apa boleh buat ini maksimal yang bisa kita lakukan saya kira.

Lalu kemudian Bu Lida ya, soal BOS dobel anggaran saya kira kok tidak, karena BOS ini by name, by adress dan vaksin pasti tidak bisa dobel-dobel karena masuk dalam setiap yang divaksin itu sudah masuk dalam aplikasi peduli lindungi, jadi agak sulit untuk bisa dobel-dobel itu. Nah terkait dengan laptop yang ada di Kemendikbud, ya memang gini, ini keterbatasan anggaran saya kira yang kita miliki. Namun untuk itu kita tidak berhenti untuk berkreasi, karena begini salah satu contoh bu, kalau kita memberikan laptop atau handpone misalnya untuk anak-anak kita yang ingin yang untuk bisa melakukan belajar jarak jauh, ada dua hal penting saya kira yang pertama soal mulai dibukanya pembelajaran tatap muka. Jadi kan kalau memberi laptop, memberi hand pone nah memberi handphone kepada anak-anak kita disaat pembelajaran tatap muka ini apakah masih diperlukan? Ini satu,

Yang kedua *coverage* area kita ini juga jadi persoalan. Kalau kita berikan handphone kepada anak-anak untuk bisa belajar secara jarak jauh gitu ya, itu tidak semuanya di wilayah Republik Indonesia ini tercover dengan

internet, jaringan internet. Jangan-jangan nanti yang kita bagikan ini tidak bisa digunakan. Ini belum lagi bicara problem misalnya siapa yang beli pulsa, nanti habis dipakai nonton you tube saja, bikin tik tok misalnya begitu. Jadi memang ada banyak problem yang terus kita kaji apa sebaiknya, yang kita bisa afirmasikan kepada anak-anak kita sebagaimana teman-teman kita di Kemendikbud memberikan laptop kepada pelajar. Tapi in sya allah kita akan terus berkreasi dengan keterbatasan anggaran.

Kemudian Bu Annisa penggunaan asrama haji sampai kapan, saya kira sampai kita butuhkan, jadi kalau kita membutuhkan kita bisa tarik kembali. Itu kesepakatannya jadi sementara kita belum membutuhkan untuk kegiatan haji asrama haji akan kita sodakohkan untuk penanganan Covid-19. Tadi soal imam di Masjidil Haram saya kira itu kita belum berani menembus kesana Bu, agak susah itu, jadi imam di Masjidil Haram, lha kalau di UEA itu (Uni Emirat Arab) kita sedang mengusahakan. Boleh bawa keluarga karena akan dapat tunjangan yang cukup saya kira, tunjangannya juga cukup, tunjangan yang cukup untuk imam itu ya, itu kalau disini ya ya lumayanlah gajinya saya kira setara dengan Eselon II.

Kemudian soal refocusing, jadi refocusing ke Pak Achmad tadi mengatakan direfocusing kok malah nambah ini, ini sebenarnya bisa dilihat di penjelasan kami di halaman 14 kalau sudah dibagikan bapak. Di poin g itu, jadi sebenarnya anggaran yang kita terima dari penambahan sekitar 1,6 triliun itu sudah terserap 94,27%. Jadi meskipun bertambah itu tidak berasa Pak, karena sudah habis dulu, jadi ketika ditambahkan itu sudah habis Pak, jadi yang ditambahkan cuma angkanya, jadi sudah habis duluan, itu penjelasannya.

Kemudian soal penyerapan anggaran, penyerapan anggaran Pak Achmad saya persilakan nanti kalau butuh lebih detail untuk kontak di jajaran Eselon I kami, nanti kalau tidak ada yang tidak mau ditelpon laporkan saya Pak. Jadi secara ringkas saya sampaikan Pak, Sekjen ini sudah menyerap anggaran sebesar 63,29%, di Irjen 54,9%, Dirjen Bimas Islam 61,26%, Dirjen Pendis 63,73%, Dirjen Bimas Kristen 57,4%, Dirjen Bimas Katholik 58%, Dirjen Bimas Hindu 60,76%, Dirjen Bimas Budha 63,91%, Dirjen PHU 41,47%, Balitbang dan Diklat 56,77%, BPJPH 31,58%. Jadi secara total, secara rata-rata 62,67% anggaran di Kementerian Agama sudah terserap, nah mungkin agak sulit di forum ini memperinci secara detail Pak ya, nanti silakan kita berikan kesempatan untuk langsung kontak ke Eselon I.

Nah soal jamarah tadi karena ini hasil kesepakatan kita Pak, jadi namanya kesepakatan kita tidak akan berani melanggar Pak. Di Kementerian Agama ini pak, insya allah teman-teman ini kalau sudah sepakat tidak akan ada yang berani melanggar pak, in sya allah.

Nah soal prioritas Kementerian Agama kenapa Rp76.000.000.000,- masih kurang Pak? Itu masih kecil sekali, karena kami memiliki beberapa prioritas program, ada 7 prioritas program kebijakan Pak, saya sampaikan

secara umum saja. Satu penguatan sistem informasi halal, karena ini bagian dari turunan Undang-undang Ciptaker Pak, soal BPJPH ini (Jaminan Produk Halal). Kemudian moderasi beragama, moderasi beragama itu menjadi prioritas nasional karena ada di RPJMN Pak, jadi kami harus masukkan ini. Lalu ada tahun toleransi, tahun toleransi itu kita akan laksanakan di Presiden akan mencanangkan tahun depan, tetapi *roadmaps* untuk menuju ke tahun depan itu kami harus siapkan.

Lalu ada program revitalisasi KUA yang tadi diperbincangkan oleh banyak Anggota, soal KUA yang bodol disana sini Pak, yang tidak bisa diapa-apa karena tanahnya milik daerah. Nah ini kami juga sudah usahakan untuk melakukan revitalisasi KUA termasuk didalamnya bagaimana mensiasati tanah yang bukan milik Kementerian Agama? Apakah kita bisa dorong pemerintah daerah menghibahkan tanahnya atau kita mencari lokasi tanah yang lain.

Kemudian kemandirian pesantren, kita tahu pesantren ini sudah memiliki undang-undang, oleh karena sudah memiliki undang-undang maka kewajiban kita semua untuk bisa melaksanakan undang-undang ini. Dan salah satu poin penting dari undang-undang pesantren itu bagaimana mewujudkan pesantren itu bisa mandiri secara ekonomi maupun operasional, dan ini menjadi bagian dari program prioritas Kementerian Agama. Lalu ada *religious index*, *religious index* ini untuk mengukur sejauhmana tingkat religiusitas masyarakat Indonesia dibanding dengan negara-negara lain? Ini penting agar apa, kita memiliki dasar ketika kita ingin menyampaikan atau kita ingin mendakwahkan cara beragama di Indonesia, cara beragama di Indonesia kepada dunia luar untuk memperbaiki peradaban dunia yang kita tahu semakin hari semakin tidak karu-karuan tentunya. Jadi ini ukurannya, kita tidak boleh tiba-tiba percaya diri bahwa kita bisa mengeksport cara beragama kita ke dunia luar sebelum kita tahu, sebelum kita bisa tahu ukuran keberagamaan kita ini sejauh apa?

Nah terkait dengan Surat Edaran Dirjen yang melarang jajarannya menjadi kothib atau imam, memang ini menjadi kebijakan, secara umum menjadi kebijakan Menteri AgamaPpak, terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Kita tahu banyak, bukan banyak, kita tahu dan khawatir jika acara-acara keagamaan itu menjadi pemicu, pemicu bagi ledakan penularan covid, kemarin di Idhul Adha yang terakhir tentu kita tidak ingin muncul kerumunan-kerumunan yang tidak terkendali karena shalat idhul adha sehingga menjadi tertuduh, bahwa orang kalau Shalat led yang akan menjadi klaster baru, kita tidak ingin. Nah salah satu cara untuk mencegahnya dengan memberikan surat edaran itu pada Dirjen kami untuk tidak menjadi kothib atau imam di shalat Idhul Adha. Saya kira dengan begitu otomatis akan membatasi orang untuk menyelenggarakan shalat Idhul Adha secara berjamaah tanpa protokol pak.

Kemudian Pak KH. Bukhori saya soal keadilan anggaran ya, soal keadilan anggaran pendidikan ya soal adil itu kan selalu tergantung pada

perspektifnya Pak. Adil itu juga proporsional, adil itu tidak sama rasa sama rata saya kira, adil itu sesuai proporsinya. Nah soal adil atau tidak memang tergantung dari mana kita memandangnya, kaca mata apa yang kita pakai. Tetapi bahwa kita memiliki kekurangan-kekurangan dalam mengafirmasi pendidikan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama iya, setuju. Ini akan menjadi PR kami di Kementerian Agama untuk menyetarakan setidaknya tidak jauh-jauh jaraknya dengan anggaran yang ada di Kementerian Pendidikan. Sebagaimana tadi Pak Ketua sudah mengamanatkan, in sya allah kita akan mengikhtiarkan Pak, kita akan berusaha tapi mohon waktu, mohon waktu kami harus membuktikan beberapa hal terlebih dahulu sebelum kami meminta sesuatu, kira-kira begitu Pak.

Jadi ini dari keterbatasan anggaran ini kita akan maksimalkan, sehingga kita memiliki landasan untuk menuntut lebih. Karena mohon maaf saya ini ditugaskan di Kementerian ini belum lama Pak, belum ada parameter yang cukup untuk kira-kira pantas minta tambahan anggaran gitu kira-kira begitu,

KETUA RAPAT:

Mungkin perlu dua periode Pak ya?

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Jangan Pak, kita tata dulu ini sehingga ketika kita minta tambahan anggaran itu basis argumentasinya sudah cukup kuat. Itu saya kira, kemudian soal BOP Madrasah, Pesantren, PAUD dan seterusnya memang ada tetapi belum direalisasikan Pak. Tidak ada itu kalau sudah direalisasikan baru pengajuan ya kemarin, baru pengajuan-pengajuan proposal. Jadi memang sama Dirjen Pendis juga belum berani melaporkan karena memang belum dilaksanakan. Sudah dihilangkan bintangnya sama, iya sudah bintang sudah hilang artinya sudah mulai bisa, tapi baru proses, proses pengajuan proposal, jadi belum ada pencairan itu belum ada, memang ada berapa kasus kemarin pak saya juga dapat itu pengaduan seperti itu WA-WA seperti itu, dan itu penipuan. Kita sudah urus ada dua orang yang sudah kita laporkan ke polisi dan sekarang udah di dalam kantor Pak, kantor polisi maksudnya. Itu, memang ada dua orang yang mereka minta kickback dulu, jadi ada yang dapat Rp15.000.000,- tapi minta dulu administrasi Rp2.000.000,- gitu Pak, itu sudah kita laporkan dan salah satunya mengaku sebagai Kementerian A

gama, dan itu bukan ternyata, itu orang Grobogan Pak Purwodadi.

F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Izin Pak Menteri, Pak Ketua mohon izin. Pak jadi awal inikan untuk pengajuan yang terbuka melalui website, tapi kemudian kita sebagai anggota juga tidak pernah mendapat informasi yang lebih clear ya, bahwa kemudian bapak tahu kan kita punya juga konstituen yang luar biasa banyaknya terkait dengan pesantren, madrasah, dan seterusnya. Nah alangkah baiknya saya kira memang kalau diperbandingkan kita ini kan juga mengadvokasi, juga wilayah-wilayah kita ini mendapatkan perhatian juga. Nah untuk bisa itu kompromisnya saya kira memang teman-teman Komisi VIII sedianya mendapat informasi terlebih dahulu sehingga madrasah-madrasah, MDT-MDT, MQur'an juga itu kemudian juga bisa kita bantu untuk kegiatannya. Demikian Pak Menteri terima kasih.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Baik, saya di forum ini perintahkan Pak Dirjen Pendis untuk komunikasi dengan Komisi VIII Pak, selesai Pak ya.

Baik selesai, kemudian asrama haji di Jawa Tengah kebetulan beberapa hari yang lalu sudah diskusi dengan Pak Sekjen soal Asrama Haji di Jawa Tengah. Mudah-mudahan Pak kita bicarakan bersama-sama, calon lokasi sudah ada beberapa, calon lokasi dan mudah-mudahan ya kita belum berani ngomong sebelum ada fixs dulu Pak, kita nanti akan laporkan semuanya setelah itu fixs. Jadi jangan sampai ya kitanya rame di depan, tapi dibelakang tidak ini Pak mudah-mudahan, tapi kita akan terus usahakan.

Itu saya kira apa lagi ya? Cukup saya kira ya, semua sudah saya sampaikan dan insya Allah komunikasi kami Pak di Kementerian Agama sangat terbuka, silakan saja dengan atau tanpa group WA. Kalau memang mau dibikin group ya monggo, tidak juga tidak apa-apa, nggak masalah, saya kira bapak/ibu sekalian yang kontak saya tidak ada yang tidak saya jawab Pak, semua saya jawab.

Saya kira demikian terima kasih Ketua, dan seluruh Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII yang terhormat.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Menteri sudah merespon atau menjawab dari semua anggota.

Baik, kita sampai di draf kesimpulan mohon ditampilkan, saya akan bacakan Bapak/Ibu Anggota dan Pak Menteri, mohon kiranya dicermati

makna dan kalimat, walaupun nanti perlu ada perbaikan kami persilakan setelah kami bacakan.

KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI
DENGAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2021 - 2022
Senin, 30 Agustus 2021

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia membahas penyesuaian penggunaan anggaran atau *refocusing* pada kebijakan APBN tahun 2021, isu-isu aktual dan alternatif solusinya. Disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai penyesuaian *refocusing* dan realokasi anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2021 sebagai berikut:
 - a. *Refocusing* anggaran tahun 2021 sampai dengan Tahap I sampai dengan Tahap IV dengan total penghematan sebesar Rp1.981.702.319.000 dengan rincian sebagai berikut, sebagaimana di tabel nomor 1 sampai 4 program dukungan manajemen, kerukunan umat, dan layanan kehidupan beragama dan pendidikan tinggi, kualitas pengajaran dan pembelajaran, PAUD, dan wajib belajar 12 tahun dengan dengan rincian Tahap I sampai dengan Tahap IV dengan total *refocusing* Rp1.981.702.319.000,-.
 - b. Realokasi anggaran sisa operasional haji tahun 2021 sebesar Rp205.810.022.000,- yang difokuskan untuk:
 - 1) Kegiatan jagong masalah Umroh dan Haji (Jamarah)
 - 2) Desiminasi terkait pembatalan keberangkatan dan jamaah haji tahun 2021.
 - 3) Perbaikan atau renovasi tata ruang pelayanan haji.
 - 4) Sarana prasarana PTKIN dan Kanwil.
 - 5) Kegiatan prioritas kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - 6) Dukungan operasional perkantoran haji.

2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama Republik Indonesia menindaklanjuti masukkan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Mengoptimalkan diplomasi dengan Pemerintah Saudi terkait mekanisme penggunaan vaksin booster yang tidak memberatkan calon jamaah pada penyerangan ibadah umrah.
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, TNI, Polri dan/atau lembaga lain untuk melakukan percepatan target capaian vaksin nasional di satuan kerja yang ada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - c. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pembelajaran perkuliahan tatap muka di madrasah dan perguruan tinggi keagamaan atau sekolah yang ada di bawah Kementerian Agama.
 - d. Menuntaskan permasalahan proyek pembangunan gedung yang belum terselesaikan, seperti tadi disampaikan Pak HBA di Jambi salah satunya, atau di Sumatera Utara dan lain sebagainya, yang dibiayai oleh dana SBSN.
 - e. Mengevaluasi rencana anggaran dan kegiatan pada seluruh satuan kerja di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berpotensi tidak akan terserap, sehingga dapat dilakukan realokasi pada program dan peningkatan prioritas yang lain.
 - f. Mengupayakan percepatan pengalihan status asrama haji yang dimiliki pemerintah daerah kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai upaya meningkatkan kualitas sarana prasarana dan layanan ibadah jamaah haji.

Silakan para anggota ada yang perlu dicermati, termasuk dari meja Pimpinan terhadap draf yang saya bacakan. Silakan pak Achmad.

F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):

Realokasi anggaran 1 b sisa operasional haji disitu ada kata sisa, sementara ini kan diakhir tahun anggaran kita belum berakhir, ini alokasi anggaran yang belum terpakai untuk operasional haji tahun 2021. Yang belum terpakai itu bukan sisa, karena tidak jadi berhaji itu,

KETUA RAPAT:

Jadi redaksinya usulannya?

F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):

Jadi relokasi anggaran yang belum terpakai untuk operasional haji, sisa itu diganti dengan yang belum terpakai Pak. Kata-kata sisa itu kan setelah berakhir tahun anggaran, inikan dana itu belum terpakai, jadi belum terpakai direlokasikan untuk ini yang 6 poin ini.

KETUA RAPAT:

Tapi begini Pak Achmad, walaupun haji batal dari Pagu Anggaran atau Anggaran APBN tahun 2021 sudah ada yang terpakai. Sudah ada yang terpakai, misalkan untuk buku, untuk rapat-rapat, untuk apa namanya manasik itu. Jadi memang sudah ada sisa anggaran haji yang sudah terpakai, karena hajinya sudah, kan kita Panja haji juga sudah selesai itu.

F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Karena batal sehingga ada sisa.

KETUA RAPAT:

Iya makanya, dan bulan haji sudah tahun apa bulan Juli kemarin kan batal yang ya memang sampai sekarang ada sisa karena sudah lewat bulan haji. Tapi gimana redaksi yang terbaik gimana?

F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):

Ya didalam sistem keuangan, itu kan itu kata sisa itu pada akhir untuk anggaran Ketua, ya belum terpakai istilahnya.

WAKIL KETUA/F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si):

Izin Pimpinan. Kalau menurut saya yang tidak terpakai, karena menurut Pak Achmad kan mengacu pada Silpa kan?

F- P. DEMOKRAT (Drs. H. ACHMAD, M.Si.):

Iya.

WAKIL KETUA/F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si):

Yang tidak terpakai.

KETUA RAPAT:

Jadi redaksi saja. Jadi realokasi anggaran yang belum, yang tidak terpakai. Oke, silakan yang lain!

WAKIL KETUA KOMISI VIII/ F- PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si):

Izin Pak Ketua! Saya ingin memasukan kesepakatan kita dengan Menteri Agama membicarakan tentang terutama guru besar, ini kan bukan Mendiknas, yaitu masalah mata pelajaran umum.

KETUA RAPAT:

Iya-iya.

WAKIL KETUA KOMISI VIII/ F- PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si):

Perlu kesepakatan antara kita Menteri Agama, Mendiknas dengan Komisi VIII. Terima kasih Pak ketua.

KETUA RAPAT:

Iya di poin pertama kali itu malahan itu. Meminta Menteri Agama Republik Indonesia untuk menindaklanjuti proses guru besar yang selama di Kemendikbud itu bisa diambil alih oleh Kementerian Agama atau bagaimana?

WAKIL KETUA KOMISI VIII/ F- PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si):

Nah maksud saya kita melakukan rapat gabungan dengan Mendiknas.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Izin Ketua. KMA Keputusan Menteri Agama tentang itu sudah selesai, hari ini kita meminta ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan penilaian terhadap guru besar, guru besar PTKIN yang berbasis ilmu non agama. Untuk yang khusus agama bagian kita, karena kita bagi misalnya di UIN untuk *enggineer* itu tetap guru besarnya dari Kemendikbud, untuk Usuludin (ustadzhah) Usuludin, syari'ah, tarbiyah dan adap da'wah itu menjadi bagian dari domain kita.

KETUA RAPAT:

Jadi sebetulnya lagi dipilah gitu ya?

WAKIL MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Iya. Berkaitan dengan mata pelajaran yang tidak diizinkan oleh Diknas Pak.

KETUA RAPAT:

Program studi (Prodi) program studi.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Jadi prodi itu, itu sudah tingkat menteri itu, iya soal prodi itu pak mungkin gini ini masih dalam proses pembicaraan dengan pak Nadim. Soal pembukaan prodi memang prodi umum di UIN, ini perlu beberapa tahapan lagi pak, masih perlu berapa tahap pembicaraan lagi. Jadi masih belum bisa kami laporkan dikesempatan ini.

WAKIL KETUA/F-PKB (MARWAN DASOPANG):

Tidak maksud teman-teman ini kalau misalnya kalau didorong juga oleh teman-teman Komisi VIII melalui rapat dengan Menteri, apakah dimungkinkan tidak gus? Rapat Gabungan.

KETUA RAPAT:

Rapat gabungan Pak Menteri.

WAKIL KETUA/F-PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Sebetulnya isunya bukan hanya soal ini, tapi kita ingin dorong juga soal keadilan anggaran itu.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Kalau dilaksanakan rapat gabungan sih boleh saja, tapi yang perlu supaya menjadi perspektif kita, bahwa memang ini sedang diarahkan untuk menuju strategi pendidikan tunggal. Nah ini yang menjadi memang agak panjang roadmapsnya itu nanti, jadi ada strategi pendidikan tunggal, karena sekarang ini kan masih dianggap macam-macam ini, ada strategi pendidikan keagamaan, ada pendidikan umum, kemudian ada yang di kementerian/lembaga itu ada STAN itu lho maksudnya macam-macam semuanya ini bagaimana sekarang mau diarahkan menjadi strategi pendidikan tunggal. Nah ini saya kira *roadmaps* ini menjadi salah satu pertimbangan,

WAKIL KETUA/F-PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Justru ini semakin menarik gus, kalau mau ada strategi itu, saya khawatir malah kalau Kementerian Agama ditinggalkan.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

In sya allah tidak kalau itu Pak. Oh gitu.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Kalau meninggalkan itu saya kira tidak, tapi saya kira kalau rapat gabungan, itu menarik juga untuk salah satunya mendorong supaya lebih proporsional soal anggaran ini. Saya tidak mau bilang ini tidak adil pak, karena ini.

KETUA RAPAT:

Saya kira forum rapat gabunga itu penting Pak Menteri, supaya isu nasional juga kena gitu, bahwa kita memang serius sepertinya ada ketimpangan gitu lho antara Kemendiknas sama yang dibawah Kementerian Agama. Tidak apa-apa dimasukkan saja itu.

F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Boleh jadi ditambahkan Kementerian Keuangan Pak.

KETUA RAPAT:

Iya betul Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, dan Bappenas, Kemenpan RB yang paling penting malahan kelembagaan masalahnya. Rapat Gabungan bersama Mendikbud, Menteri Agama, Menteri.

WAKIL KETUA/F-PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Menteri Agamanya diawal karena mitra kita.

KETUA RAPAT:

Iya ini kelihatannya kaya Komisi X kita ini.

WAKIL KETUA/F-PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Gus Menteri ini masih mitra kita.

KETUA RAPAT:

Makanya saya kaya di Komisi X yang saya rasakan yang tadi saya bacakan, Menteri Keuangan dan Bappenas. Silakan yang lain masih ada?

WAKIL MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Wamen.

WAKIL MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Saya mohon dicek ulang di undang-undang apa yang mengatur kita, terkait dengan rapat gabungan, MD3, apakah itu kewenangan komisi ataukah itu kewenangan Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Iya.

WAKIL MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Untuk itu kalau misalnya kewenangan Pimpinan yang mengundang berarti bukan Komisi VIII, Komisi VIII mengusulkan kepada Pimpinan untuk bisa diselenggarakan rapat gabungan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, prosedurnya memang Pak Wamen nanti Pimpinan Komisi VIII akan berkirim surat kepada Pimpinan DPR Pak, dan tadi sebelum rapat sudah kita konsep untuk rapat gabungan. Ya, dan nanti kita minta izin ke Pimpinan kalau itu memang dilimpahkan ke Pimpinan biasanya juga rapat gabungan para Menteri Pimpinan DPR yang pimpin, atau bisa juga rapat, disini juga beberapa kali rapat gabungan dengan para Menteri, tapi kita yang pimpin Pak, tergantung isunya sebenarnya. Kalau isunya besar dan macam-macam komisi mungkin pimpinan yang Pimpinan DPR yang mimpin, tapi kalau isunya tentang komisi yang terkait ya mungkin pimpinan komisi. Tapi tetap kami akan konsultasikan dengan Pimpinan DPR Pak Wamen. Ya silakan Pak Bukhori.

F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Pak Ketua mohon izin. Tadi sebagaimana Pak Menteri sampaikan, mau memerintahkan kepada Dirjen terkait dengan komunikasi terkait dengan beberapa hal yang pendistribusian tadi mengenai BOP lalu MBP, dan MPTQ, saya kira bisa perlu dibuat semacam satu kesimpulan atau satu poin yang kemudian bisa mengikat atau bisa meningkatkan optimalisasi kita dalam komunikasi yang efektifitas.

KETUA RAPAT:

Kalau perintah Pak Menteri itu saya yakin tidak berani melanggar ini Sekjen, Dirjen mana berani sama menteri. Sehingga laporkan saja Pak Pendis itu tidak balas WA Pak Bukhori laporkan saja nanti Pak, saya kira itu sudah selesai itu, kata Pak Menteri waktu awal-awal disini. Kalau kita disini ini, ini pelatih semua pak, Pak Bukhori pelatih, Pak Samsu Niang pelatih, saya pelatih tidak ada pemain, tapi kalau disitu nah pelatihnya Cuma satu Pak Menteri yang lain pemain. Itu artinya.

F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Makanya supaya antar pelatih ini kemudian terjadi apa yang lebih pasti, begitu dituangkan didalam salah satu poin yang terkait di poin 2 ya poin 2, silakan redaksinya yang lebih baik monggo.

KETUA RAPAT:

Apa terlalu tinggi Pak dalam rangka kita tuliskan itu? Karena tadi langsung dijawab sama Pak Menteri diperintahkan gitu lho. Nah kalau bulan depan atau dua minggu lagi tidak direspon sama Pak Dirjen baru kita tulis Pak. Mungkin, tapi kita tape cesh dulu Pak ini ya, gitu ya Pak Bukhori ya? Iya. Baik masih ada, terakhir silakan Pak Menteri masih ada yang perlu dikoreksi?

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Saya kira cukup Pimpinan

KETUA RAPAT:

Ya baik, Pak Menteri beserta seluruh jajaran, Pak Wamen dan Pimpinan Komisi VIII beserta para Anggota, baik yang hadir fisik maupun virtual, terhadap draf kesimpulan yang kami bacakan tadi sudah mengalami perbaikan dari segi redaksi maupun makna, tidak perlu lagi saya bacakan dari awal sampai akhir.

Apakah dapat kita setujui sebagai kesimpulan rapat? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, kita sudah diakhir rapat kerja kita pada sore hari ini, sebelum ditutup kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan kata akhir dalam rapat kerja ini. Silakan Pak Menteri.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan dan para Anggota yang terhormat.

Saya kira rapat kita pada hari ini sangat produktif sekali dan terima kasih *refocusing* anggaran dapat dukungan yang penuh dari Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII yang terhormat, mudah-mudahan ini akan menjadi kerja sama dan sekaligus komitmen bersama kita, untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan kita dimasa yang akan datang. Dan terkait dengan komunikasi dan *in sya allah* sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua apalagi di forum sangat terhormat ini sudah disampaikan tidak akan berani itu. Dirjen-dirjen ini main belakang lagi Pak mainnya didepan semua sekarang. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Itu berarti Pak Bukhori itu di atas kesimpulan itu Pak karena dibuat di penutup Pak.

Baik, terima kasih Pak Menteri beserta seluruh jajaran, para Pimpinan dan Anggota *alhamdulillah* kita sudah sampai di penghujung rapat kerja ini dengan menghasilkan beberapa kesimpulan tadi, mudah-mudahan kesimpulan itu bisa kita kawal secara bersama-sama demi pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Dan kita akan rapat kerja lagi dengan Pak Menteri Agama membahas RKA K/L hari Senin, hari Senin? Ya baik kita akan rapat kembali dengan Pak Menteri Agama hari Senin tanggal 6 September 2021, dengan agenda RKA K/L tahun 2022.

Bapak/Ibu dengan demikian berakhirlah Rapat Kerja kita pada hari ini, dengan mengucapkan *Alhamdulillah hirabil'alamiin*. Rapat kerja ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL: 16.39 WIB)

**Jakarta, 30 Agustus 2021
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
NIP. 197309261997031001**